

**UPAYA *IRELAND PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN* (IPSC) DALAM
MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA TAHUN 2023-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NAJWA SYIFA HABIBILLAH

22323168

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**UPAYA *IRELAND PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN* (IPSC) DALAM
MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA TAHUN 2023-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NAJWA SYIFA HABIBILLAH

22323168

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina Tahun 2023-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

9 Juni 2026



Mengesahkan



Karna Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A
- 3 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

8 Juni 2026,

A yellow 10,000 Rupiah stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10.000", "METER", "TEMPER", and "AFBANK08548643".

Najwa Syifa Habibillah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1	
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Cakupan penelitian	14
1.5 Tinjauan Pustaka	15
1.6 Kerangka Pemikiran	18
1.7 Argumen Sementara	22
1.8 Metode Penelitian	23
1.8.1 Jenis Penelitian	23
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	23
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	23
1.8.4 Proses Penelitian	24
1.9 Sistematika Pembahasan	24
BAB 2	26
2.1. Shared-Grievances Antara Irlandia dan Palestina	26
2.1.1 Irlandia di bawah Jajahan Inggris	26
2.1.2 Palestina di bawah Jajahan Inggris dan Zionis	33
2.1.3 Paralel Sejarah Kolonialisme Irlandia dan Palestina	37
2.2. Gerakan Solidaritas di Irlandia dan Profil Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC)	40
2.2.1 Gerakan Solidaritas di Irlandia	40
2.2.2 Profil Ireland Palestine Solidarity Campaign	43
BAB 3	46
3.1. Diagnostic Framing	48
3.2. Prognostic Framing	53
3.3. Motivational Framing	58
BAB 4	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2 Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pilar Utama Framing

11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Poster Penyelenggaraan Diskusi oleh IPSC	42
Gambar 2. Penyelenggaraan Hustings oleh IPSC	46
Gambar 3. Penyelenggaraan Pelaksanaan Workplace Day of Action	48
Gambar 4. Spanduk Protes di Bandara Shannon	53

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) dalam memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina selama periode 2023-2024. Solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina dipengaruhi oleh adanya kesamaan pengalaman historis terkait kolonialisme,

penjajahan, dan perjuangan kemerdekaan yang kemudian membentuk resonansi solidaritas di masyarakat. Sebagai kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan *framing theory* yang dijelaskan oleh Robert D. Benford dan David A. Snow untuk menganalisis proses *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing* yang dibangun oleh IPSC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data agenda, kampanye, serta publikasi IPSC selama periode penelitian. Dari penelitian ini, IPSC membingkai konflik di Palestina sebagai bentuk penjajahan, apartheid, dan pelanggaran hak asasi manusia. Solusi yang ditawarkan oleh IPSC berupa tekanan terhadap Israel dan pemerintah Irlandia, serta kampanye *Boycott, Divestment, and Sanction* (BDS). Narasi pembingkai IPSC dinilai efektif dalam membangun persepsi yang satu di masyarakat dan konsistensi dalam gerakan.

Kata-kata kunci: *Framing*, gerakan, IPSC, Irlandia, Solidaritas.

ABSTRACT

This study examines the efforts of the Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) in order to mobilize Irish public solidarity with Palestine during the 2023-2024 period. Irish public solidarity with Palestine is influenced by shared historical experiences related to colonialism, occupation, and the struggle for independence, which have fostered bonds of solidarity among the public. As a theoretical framework, this study applies the framing theory introduced by Robert D. Benford and David A. Snow to analyze the diagnostic, prognostic, and motivational framing processes constructed by the IPSC. The study adopts a qualitative approach through literature review and the collection of data on the IPSC's agendas, campaigns, and publication during the research period. This Study finds that IPSC frames the conflict in Palestine as a form of occupation, apartheid, and human right violations. The solutions offered by the IPSC include pressuring Israel and the Irish government, as well as the Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) campaign. The IPSC's framing strategy is considered effective in fostering a unified public perception and maintaining consistency within the movement.

Keywords: *Framing, Ireland, movement, Palestine, Solidarity*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jejak kolonialisme dan pendudukan Inggris yang berlangsung ratusan tahun begitu membekas dalam sejarah Irlandia meninggalkan memori kolektif yang kuat dalam ingatan masyarakat Irlandia. Pengalaman tersebut menciptakan ikatan erat dan rasa solidaritas mendalam terhadap Palestina, yang sampai sekarang masih berjuang menghadapi pendudukan, pengusiran paksa, dan berbagai bentuk praktik kolonial dan kekerasan lainnya. Banyak masyarakat Irlandia melihat adanya kesamaan antara pengalaman historis mereka dengan kondisi yang dialami Palestina. Pengalaman selama pendudukan Inggris, pengusiran paksa dan kekerasan terhadap penduduk asli, konflik sektarian, wabah kelaparan besar pada abad ke-19 (*The Great Famine*), membentuk ikatan alami serta rasa empati yang kuat terhadap perjuangan Palestina. Kesamaan pengalaman tersebut memungkinkan masyarakat Irlandia untuk mengidentifikasi perjuangan di Palestina sebagai refleksi sejarah mereka dahulu (Browne 2024, 94).

Sebelum menjadi Republik Irlandia atau Negara Bebas Irlandia, Irlandia mengalami penjajahan oleh Inggris dari abad ke-13 hingga tahun 1921 dan menjadi Negara Bebas Irlandia pada tahun 1922 (Syaifulloh 2022). Dalam masa penjajahan Inggris, tepatnya pada tahun 1880-an, James Balfour yang menjabat sebagai sekretaris kabinet Inggris untuk Irlandia menentang aksi masyarakat Irlandia yang menginginkan pemerintahan sendiri. Puncaknya pada tahun 1887, Balfour menginstruksikan polisi untuk menembaki para pengunjung rasa di Mitchelstown, Irlandia, hingga kemudian menewaskan beberapa orang.

Kekejaman Balfour terekam dalam ingatan masyarakat Irlandia sampai peristiwa memilukan tersebut diberi julukan sebagai *Bloody Balfour*.

Di sisi lain, pada Desember 1917, Inggris menguasai Palestina secara *de jure* dan mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menjanjikan Tanah Palestina sebagai kampung halaman bagi bangsa Yahudi. Deklarasi ini diberikan Inggris sebagai ungkapan balas budi atas bantuan yang mereka minta kepada bangsa Yahudi di Amerika Serikat ketika beraliansi dengan Amerika Serikat untuk memenangkan Perang Dunia I (Aswar 2024). Bagi Bangsa Yahudi, Deklarasi Balfour menjadi awal baru untuk mendirikan negara mereka—Israel, di Tanah Palestina, padahal janji tersebut diberikan Inggris tanpa maksud memberikan kedaulatan penuh atas Tanah Palestina kepada Bangsa Yahudi. Deklarasi Balfour menuai respon negatif dari negara-negara Arab dan menjadi awal perang berkepanjangan antara bangsa Arab dan Israel hingga jutaan yang menjadi korban jiwa (Smith and Vandanam 2010).

Irlandia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menyerukan dukungan kemerdekaan untuk Palestina. Sejak tahun 1950-an, Irlandia telah mendukung Palestina dibuktikan dengan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Irlandia di Timur Tengah mengenai solusi atas konflik Palestina dan Israel serta upaya penanganan pengungsi Palestina (Kurniawan 2018, 67). Dalam *Joint Declaration* pada tahun 1980, Menteri Luar Negeri Irlandia dan Bahrain mendeklarasikan bahwa solusi atas konflik di Timur Tengah harus berdasarkan Palestina sebagai negara yang berdaulat penuh, independen, dan hidup sejajar dengan Israel (Department of Foreign Affairs n.d.). Masih di tahun yang sama,

Irlandia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi menyerukan pembentukan negara Palestina(Aysu Bicer 2023).

Setelah peristiwa 7 Oktober 2023, ungkapan solidaritas masyarakat Irlandia terhadap orang-orang dengan atribut khusus seperti kafiyyeh dan jilbab semakin mendalam. Masyarakat Irlandia dengan senang hati menawarkan pelukan hangat dan dukungan kepada orang-orang dengan atribut tersebut, sebagai bentuk dukungan moral atas apa yang terjadi di tanah asal mereka (Frayer and Al-Kassab 2024). Anggota parlemen Irlandia menjadi yang pertama di Eropa dalam menyatakan perlindungan dan seruan keselamatan bagi masyarakat sipil. Bersamaan dengan respons Israel terhadap Palestina yang tidak manusiawi, Israel merespon dengan bombardir serangan ke Palestina hingga korban jiwa mencapai 15.000 orang (Specia 2023). Sebagai respon peristiwa 7 Oktober 2023, di Irlandia pada awal November 2023 dilakukan survei dengan hasil 71% masyarakat Irlandia melihat respon Israel sebagai tindakan yang sangat tidak proporsional (Lex McMenamin 2024).

Pemerintah Irlandia terlibat secara konsisten dengan seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik. Menteri Luar Negeri Irlandia, Micheál Martin telah melakukan kunjungan sebanyak dua kali selama eskalasi konflik terjadi. Irlandia berada di garda terdepan dalam mendukung perdamaian dan menyerukan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil. Selain itu, Irlandia berkomitmen untuk mendorong dimulainya negosiasi untuk mencapai *two-state solution*. Upaya diplomatik intensif dengan maksud de-eskalasi terus dipersiapkan. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk simbol solidaritas di posisi Irlandia sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 2021-2022, juga di

Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Department of Foreign Affairs n.d.).

Sebagai negara yang pernah merasakan penjajahan Inggris, pengalaman tersebut membentuk bagaimana masyarakat Irlandia sekarang terlibat dalam isu konflik pasca kolonial. Dukungan Irlandia terhadap Palestina tidak hanya sebatas dukungan politik, tetapi telah menjadi *cultural movement* yang mengakar kuat (Frayer and Al-Kassab 2024). Bagi kebanyakan masyarakat Irlandia, Israel adalah entitas kolonial yang dibentuk secara paksa oleh pengaruh Inggris untuk mengklaim dirinya atas penduduk asli—Palestina (Aysu Bicer 2023).

Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) adalah organisasi independen, non partai yang dibentuk pada tahun 2001 oleh sekelompok aktivis hak asasi manusia, masyarakat Irlandia, akademisi, dan jurnalis yang memiliki perhatian mendalam terhadap kondisi di Palestina (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a). Tujuan utama dari pembentukan IPSC adalah untuk mempromosikan keterlibatan politik Irlandia dalam mendukung isu Palestina, meningkatkan kesadaran masyarakat Irlandia, dan untuk mempromosikan budaya Palestina (David Twomey 26 February). Selain itu, IPSC juga bergerak untuk mendukung Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri. IPSC bermitra dengan masyarakat Palestina yang tinggal di Irlandia dan menjadi ruang bagi mereka untuk menyuarakan isu-isu Palestina di Irlandia.

IPSC secara aktif melakukan kampanye berisi dukungan terhadap keadilan di Palestina. Kampanye dilakukan dengan meningkatkan kesadaran publik akan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di wilayah Palestina yang menjadi akar historis ketidakadilan bagi masyarakat Palestina. James Quigley,

seorang perwakilan IPSC menyatakan bahwa penjajahan yang dialami Palestina saat ini jauh lebih besar daripada yang pernah dialami oleh Irlandia. Yang dialami oleh masyarakat Palestina selama 75 tahun terakhir adalah pendudukan apartheid, pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan pembantaian (Aysu Bicer 2023). IPSC juga bergerak melakukan lobi kepada pemerintah Irlandia dan Uni Eropa, menyerukan boikot terhadap produk-produk Israel dan secara aktif menyerukan gerakan *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS). Selain itu, IPSC mengadakan diskusi terbuka dengan narasumber masyarakat dari Palestina dan Israel, disertai dengan ragam kegiatan kebudayaan dan penggalangan amal.

IPSC mendukung penuh hak masyarakat Palestina untuk menentukan nasib sendiri seperti yang tertera dan dijamin dalam United Nation General Assembly Resolution 3236. Dijelaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak paling utama dan paling mendasar bagi masyarakat Palestina dan menjadi landasan dari gerakan pembebasan nasional Palestina. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak yang tidak bisa dan tidak boleh dicabut dari setiap individu, baik di tanah asal, dan di tanah lain.

Sampai saat ini, IPSC aktif mengorganisir aksi-aksi di seluruh penjuru kota di Irlandia dan melakukan di titik vital kota. Jadwal pelaksanaan aksi tercantum dalam website IPSC dan di sosial media mereka, seperti instagram, twitter, dan facebook. Pernyataan dukungan dan capaian dari upaya mereka juga secara konsisten diunggah di website IPSC. Masyarakat dari seluruh dunia bisa ikut serta mendukung aksi IPSC dengan bermacam-macam cara, yakni dengan donasi, *subscribe* berita mereka, atau dengan mengikuti aksi yang diselenggarakan di kota-kota di Irlandia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis *Framing Theory* dalam upaya IPSC memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina pada tahun 2023-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji upaya *framing* Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC), organisasi independen Irlandia yang lahir atas kepedulian terhadap pendudukan di Palestina dalam membentuk persepsi masyarakat Irlandia terhadap konflik Palestina-Israel sebagai *shared-grievances* menggunakan *Framing Theory*.
2. Menganalisis bagaimana persepsi dan *framing* yang telah dibentuk oleh IPSC mendorong aksi kolektif dan mendapat dukungan serta partisipasi penuh dari masyarakat Irlandia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan upaya IPSC dalam membentuk persepsi dan memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia terhadap konflik Palestina-Israel menggunakan analisis *Framing Theory*. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2023 hingga 2024. Rentang waktu tersebut penulis pilih karena menandai meningkatnya intensitas konflik sekaligus menjadi sebuah titik di mana sikap dan keberpihakan berbagai negara terhadap konflik Palestina-Israel sangat disorot. Terjadinya eskalasi konflik 7 Oktober 2023 memicu gelombang

solidaritas di seluruh dunia, termasuk di Irlandia, yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi aksi massa, kampanye publik, dan advokasi politik yang mendukung Palestina. Mobilisasi publik dalam skala besar yang berlangsung dalam periode waktu tersebut memberi tekanan yang signifikan terhadap Pemerintah Irlandia. Salah satu perkembangan penting yang muncul di tengah meningkatnya tekanan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengakui Palestina sebagai negara secara resmi pada 22 Mei 2024.

Subjek penelitian difokuskan pada IPSC sebagai organisasi independen non partai di Irlandia yang menaruh perhatian mendalam pada isu Palestina dan dikenal sebagai kelompok yang paling aktif dengan cabang hampir di seluruh wilayah di Irlandia. Analisis yang fokus pada tiga pilar *framing*, yaitu *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing* (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 615). Secara geografis, penelitian ini dibatasi pada konteks politik dan sosial Irlandia, tanpa pembahasan mengenai dinamika solidaritas di negara Eropa lainnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal artikel berjudul “Peran *Ireland Palestine Solidarity Campaign* Terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018” yang ditulis oleh Fiani Nurmalasari dan Ida Susilowati, dijelaskan bahwa *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) sebagai *Civil Society Organization* (CSO) yang berada di Irlandia melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelanggaran hukum internasional dan sejarah panjang Palestina

(Nurmalasari and Susilowati 2021, 112). Jurnal ini fokus menyoroti IPSC sebagai *Civil Society Organization* dan upaya larangan impor produk Israel. Jurnal ini memberikan pemahaman terkait IPSC sebagai CSO, tetapi terbatas pada itu saja. Sehingga, penulis melakukan penelitian yang lebih luas, yaitu upaya IPSC dalam membentuk persepsi dan mobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia menggunakan analisis *Framing Theory* untuk melihat hasil akhir yang berbeda.

Brendan Ciarán Browne dalam jurnalnya yang berjudul “Reading Irish Solidarity with Palestine through Ireland’s Unfinished Revolution” menjelaskan bahwa seruan pembebasan Palestina di Irlandia dipimpin oleh para aktivis, di lereng bukit di kampung halamannya, Belfast, selama beberapa tahun terakhir terpampang slogan slogan untuk Palestina, seperti “*End the Siege of Gaza*,” “*Free Palestine*,” “#BDS,” “*Viva Palestina*” dan masih banyak lagi ungkap dukungan lainnya (Browne 2024, 92). Setelah perjuangan panjang berdarah-darah Irlandia berhasil melawan penjajahan Inggris dan menggapai kemerdekaan. Harga mahal yang harus dibayar dari kemerdekaan adalah terpecahnya Irlandia dan pembentukan negara bebas pada tahun 1921 hanya mencakup sebagian wilayah saja.

Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang sepanjang hidupnya berusaha demi persatuan dan kemerdekaan Irlandia percaya bahwa tujuan mereka dapat ditempuh dengan proses politik yang damai dan tidak lagi memerlukan kekerasan. Meskipun terdapat kesamaan perjuangan antara Irlandia dan Palestina, Palestina tidak memiliki kemewahan untuk mencapai kemerdekaan dengan proses politik damai karena situasi yang lebih kompleks (Browne 2024, 96). Jurnal ini lebih mengkritisi bahwa sebenarnya memori masa lalu yang kelam

sebenarnya bukan faktor utama rasa solidaritas masyarakat Irlandia terhadap masyarakat Palestina. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis lebih jauh mengenai hal ini dalam bab pembahasan.

Selanjutnya adalah jurnal dari Gerald M. Platt dan Michael R. Fraser yang berjudul “Race and Gender Discourse Strategies: Creating Solidarity and Framing the Civil Rights Movement.” Jurnal ini berisi analisis dari 3.500 surat yang dikirim kepada Dr. Martin Luther King Jr. dan Southern Christian Leadership Conference (SCLC) selama periode 1960-1965 yang kemudian dilakukan seleksi terhadap 508 surat yang memenuhi kriteria. Jurnal ini menyoroti bagaimana strategi diskursus untuk mengekspresikan dukungan dan pengalaman pengirim surat dengan Gerakan Hak Sipil (Gerald M. Platt and Michael R. Fraser 1998, 160).

Di sisi lain, jurnal ini juga membahas bagaimana identitas sosial seperti ras dan gender memengaruhi cara mereka membingkai dukungan mereka terhadap gerakan, serta bagaimana mereka menggunakan strategi diskursus untuk memperkuat solidaritas dan membangun jaringan dukungan. Pandangan Benford menjadi sorotan dalam jurnal ini karena menekankan pentingnya aspek historis, budaya, dan struktural dalam analisis gerakan sosial (Gerald M. Platt and Michael R. Fraser 1998, 175). Menurut Benford, interpretasi dan konstruksi realitas dalam gerakan tidak dapat dipahami secara terpisah dari situasi spesifik peserta dan latar belakang mereka, atau yang disebut juga dengan “*Situation specific*” dan “*Local knowledge*” (Gerald M. Platt and Michael R. Fraser 1998, 175).

Jurnal tersebut secara spesifik memberikan wawasan mendalam mengenai strategi diskursus dalam gerakan sipil dan pandangan Benford relevan dengan

pembahasan penelitian penulis. Sehingga, jurnal tersebut dapat membantu penulis dalam menganalisis permasalahan dan menemukan solusi dalam penulisan. Meskipun demikian, jurnal tersebut terbatas pada surat-surat yang dikirimkan dan disortir sesuai dengan ketentuan yang membuat terbatasnya sumber data.

Dari jurnal dan buku yang penulis cantumkan dan berdasarkan penelusuran penulis, didapatkan bahwa penelitian mengenai solidaritas Irlandia kepada Palestina telah banyak menjadi perhatian bersama. Namun, penelitian spesifik mengenai *Ireland Palestine Solidarity Campaign* yang aktif menyuarakan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina dalam kacamata analisis *Framing Theory* yang digagas oleh Snow dan Benford belum pernah diteliti. Maka dari itu, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang baru.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan *Framing Theory* yang digagas oleh David A. Snow dan Robert D. Benford (2000) dalam jurnal artikel mereka yang berjudul “*Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*” sebagai kerangka pemikiran dan landasan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. *Framing Theory* adalah sebuah konsep yang menyoroti bagaimana pendekatan proses pembingkai atau *framing* memengaruhi persepsi dan interpretasi terhadap isu-isu sosial dan politik (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 612). Dalam konteks gerakan sosial, *framing* berfungsi untuk menjadi alat pembentuk makna, mengarahkan perhatian, dan memobilisasi dukungan dengan menyoroti aspek tertentu dari sebuah isu yang sedang

diperjuangkan (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 612). Selain itu, *framing* memiliki beberapa tujuan, seperti untuk memfasilitasi pemahaman dan persepsi terhadap isu tertentu, mendorong tindakan kolektif dengan membangun makna yang resonan, dan memotivasi dukungan atau partisipasi dari masyarakat (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 629).

Terdapat tiga *core tasks* atau pilar utama dalam *framing*, pertama *diagnostic framing* yang maksudnya adalah proses identifikasi masalah dan atribusi penyebabnya. Aktor-aktor yang terlibat harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang menjadi perhatian, sehingga masalah dapat dipahami secara jelas dan spesifik (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 616). Kedua, *prognostic framing* atau proses penawaran solusi setelah masalah telah diidentifikasi. Pada tahap ini, aktor-aktor akan fokus pada pengembangan solusi dan strategi untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga adalah *motivational framing* atau alasan moral untuk bertindak. Pada tahap terakhir, aktor-aktor mendorong semangat agar lahir suatu tindakan, mereka mengajak orang lain untuk bergabung dan ikut serta dalam aksi kolektif, serta memberikan alasan yang memotivasi orang-orang untuk terlibat (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 617).

Tabel 1. Pilar Utama *Framing*

Jenis Pilar <i>Framing</i>	Pengertian	Tujuan
<i>Diagnostic</i>	Proses identifikasi dan penentuan aktor yang bertanggung jawab atas masalah yang muncul	Membentuk persepsi dan pemahaman publik atas suatu masalah atau isu
<i>Prognostic</i>	Proses penawaran solusi dan strategi setelah	Melaksanakan solusi dan strategi secara kolektif

	masalah telah diidentifikasi	
<i>Motivational</i>	Seruan untuk bertindak atau landasan rasional untuk terlibat dalam tindakan kolektif	Memperbaiki keadaan dengan menggunakan kosakata yang dapat menggerakkan audiens luas untuk terlibat

Sumber:

Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment

(Robert D. Benford dan David A. Snow 2000)

Dengan tiga pilar tersebut, aktor-aktor dalam gerakan saling terkait dan membangun sebuah “*Consensus Mobilization*” dan “*Action Mobilization*,” atau yang secara sederhana artinya memfasilitasi kesepakatan dan mendorong aksi (Klandermans 1984). Proses *framing* bersifat deliberatif, utilitarian, dan cenderung memiliki tujuan tertentu, seperti dengan merekrut anggota baru, memobilisasi pendukung, dan memperoleh sumber daya (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 624). Dalam proses *framing*, dilakukan identifikasi, elaborasi, dan penyebaran kerangka makna yang relevan dengan konteks sosial dan budaya tertentu. Aktor yang terlibat meliputi gerakan sosial, aktor institusional, dan elit politik.

Kemudian, terdapat beberapa faktor yang membantu mengukur sejauh mana keberhasilan *framing*, utamanya adalah resonansi atau daya tarik *framing* yang dipengaruhi oleh kredibilitas dan *salience* dari *frame*. Resonansi diukur dari sejauh mana *framing* mampu menarik perhatian, dipercaya, dan mampu

memobilisasi dukungan atau aksi dari masyarakat (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 620).

Beberapa faktor yang membantu mengukur sejauh mana keberhasilan *framing* adalah *narrative fidelity* dan kredibilitas *framing*. *Narrative fidelity* atau kecocokan narasi memiliki makna semakin cocok narasi atau cerita yang diangkat dalam suatu masalah dengan apa yang diyakini oleh target audiens, maka *framing* tersebut memiliki apa yang disebut dengan *narrative fidelity*. Dan semakin tinggi tingkat kecocokan, semakin besar daya tarik dan relevansi *framing* tersebut, sehingga memungkinkan meningkatnya mobilisasi dan aksi kolektif dari masyarakat (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 622).

Sebuah gerakan sosial idealnya mampu membangun *framing* yang dapat menarik partisipasi anggota aktif serta memperkuat solidaritas internal, tanpa menimbulkan backlash yang signifikan dari masyarakat luas serta dengan tetap menjaga keterbukaan dukungan dari elit politik di luar gerakan. Di samping itu, respon masyarakat luas terhadap *framing* sebuah gerakan dipengaruhi oleh kedekatan spasial (*spatial proximity*), semakin dekat isu yang diangkat secara sosial atau kultural, maka semakin mudah target audiens untuk merasa terkait.

Framing theory yang digagas oleh Snow dan Benford menjadi relevan dalam penelitian ini karena fokus utamanya menjelaskan bagaimana suatu aktor membangun makna, mengidentifikasi masalah, dan menawarkan solusi, hingga kemudian mendorong partisipasi publik melalui proses pendekatan pembingkai isu. Meskipun *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) memiliki struktur kelembagaan formal, aktivitas yang dilakukan menunjukkan karakteristik gerakan sosial, yaitu mobilisasi sumber daya, membangun kesadaran kolektif, serta

mengorganisir aksi solidaritas di masyarakat. IPSC tidak hanya menjalankan fungsi administratif organisasi, tetapi juga secara aktif memproduksi dan menyebarkan narasi narasi yang kemudian membentuk pemahaman publik yang satu akan konflik di Palestina. Dengan demikian, *framing theory* relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis upaya IPSC dalam memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina pada tahun 2023-2024.

1.7 Argumen Sementara

Analisis *Framing Theory* dalam upaya mobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia dalam mendukung kemerdekaan Palestina oleh IPSC pasca peristiwa 7 Oktober 2023 yang dianalisis menggunakan *Framing Theory* dipahami secara mendalam dengan tiga *core tasks framing*, yaitu *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing*. Pada tahap *diagnostic frame*, IPSC membingkai pendudukan Israel terhadap Palestina sebagai bentuk penjajahan, apartheid, dan *ethnic cleansing*. Atribusi kesalahan ditujukan kepada Israel sebagai aktor utama dan kepada struktur yang lebih luas, yakni dukungan internasional yang dinilai turut bertanggung jawab atas konflik yang berkepanjangan. Kemudian melalui tahap *prognostic frame*, IPSC menawarkan strategi konkret, yaitu kampanye boikot dan advokasi pemerintah Irlandia. Lebih lanjut, pada tahap *motivational frame* dibentuk narasi *shared-grievances* yang menekankan pentingnya masyarakat Irlandia untuk turut serta mendukung Palestina dengan melihat sejarah penjajahan yang pernah mereka alami. *Framing* yang dilakukan oleh IPSC dinilai efektif, ditunjukkan dengan konsistensi pembingkai narasi melalui berbagai agenda, baik aksi protes di jalan, atau melalui agenda edukasi, hingga hustings. *Framing* yang dibangun mendorong aksi kolektif yang konsisten selama rentang

waktu 2023 hingga 2024 dan berhasil memberikan pengaruh terhadap perjalanan RUU Embargo Senjata pada tahun 2024.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada analisis kasus-kasus konkret yang bersifat sementara dan lokal, serta dimulai dari aktivitas masyarakat (Uwe Flick 2014). Dengan metode kualitatif, penelitian ini akan secara deskriptif dalam menginterpretasikan suatu fenomena, pemikiran individu dan kelompok di mana data mengenai satu satu partisipan lebih banyak didapatkan menggunakan metode ini daripada dengan menggunakan metode kuantitatif. Fokus dari metode kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis penelitian yang komprehensif .

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC), organisasi independen, non-partai yang dijalankan oleh aktivis-aktivis sukarelawan yang berasal dari masyarakat sipil. IPSC menjadi aktor utama dalam penelitian ini. Objek penelitian adalah analisis *Framing Theory* dalam upaya IPSC memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia untuk mendukung kemerdekaan Palestina pada tahun 2023-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan oleh penulis untuk mendapatkan informasi, fakta, dan data penelitian. Setelah

mendapatkan data, penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut agar dapat dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi literatur dan menghubungi organisasi terkait untuk melakukan validasi informasi. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait penelitian dari buku, jurnal, artikel, laporan, dan berita dari sumber yang kredibel.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian adalah metode lanjutan untuk melakukan analisis mendalam dari data yang telah didapat. Pada proses ini, penulis akan mengidentifikasi data yang telah didapat dan kemudian mengelompokkan menjadi data yang mendukung penelitian dan data yang menjadi data pendukung atau data pelengkap.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini akan terdiri dari empat bab utama dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 berisi data-data terkait paralel sejarah antara Irlandia dan Palestina dilanjutkan dengan profil dan upaya *Ireland Palestine Solidarity Campaign*. Data-data tersebut mencakup upaya-upaya yang telah dilakukan oleh IPSC dalam

periode 2023-2024, termasuk aktor-aktor yang terlibat, dan capaian keberhasilan dari apa yang telah dilakukan.

BAB 3 berisi analisis *Framing Theory* dalam upaya IPSC memobilisasi solidaritas masyarakat Irlandia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Analisis strategi *framing* dan elaborasi kasus dengan data-data dari bab sebelumnya akan dijelaskan pada bab ini.

BAB 4 berisi kesimpulan dan saran penelitian

BAB 2

MOBILISASI SOLIDARITAS IRLANDIA TERHADAP PALESTINA OLEH *IRELAND PALESTINE SOLIDARITY* CAMPAIGN (IPSC)

Bab ini akan fokus membahas *shared-grievances* antara Irlandia dan Palestina, khususnya bagaimana pengalaman penjajahan Inggris membentuk memori kolektif masyarakat Irlandia sehingga mereka merasakan kedekatan terhadap penderitaan Palestina. Bab ini kemudian akan membahas dinamika gerakan solidaritas di Irlandia terhadap Palestina mulai dari latar belakang kemunculan dan perkembangan berbagai organisasi lainnya. Kemudian gerakan solidaritas di Irlandia berkembang membentuk jaringan yang luas dan lintas sektor. Keberagaman aktor dalam gerakan merefleksikan bahwa isu Palestina telah menjadi perhatian publik dari berbagai kalangan di Irlandia dan *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) dianalisis sebagai salah satu organisasi yang memimpin mobilisasi massa. Selanjutnya bab ini akan membahas profil *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) sebagai organisasi berbasis akar rumput yang lahir dari kesadaran masyarakat Irlandia terhadap isu penjajahan di Palestina.

2.1. Shared-Grievances Antara Irlandia dan Palestina

2.1.1 Irlandia di bawah Jajahan Inggris

Sebelum mencapai gelar negara yang bebas, Irlandia ‘hidup’ sebagai bagian dari kekaisaran Inggris dan kemudian kekaisaran Britania Raya selama lebih dari 700 tahun (Jane Ohlmeyer 2020). Semuanya berawal pada tahun 1169,

Bangsa Norman atau dikenal sebagai Anglo-Norman di bawah pimpinan Richard de Clare yang dijuluki *Strongbow*, memulai ekspansi ke Irlandia dalam kerangka aliansi militer atas undangan Diarmait Mac Murchada, Raja Leinster guna merebut kembali takhtanya. Sebagai imbalan, *Strongbow* dijanjikan pernikahan dengan Aoife, putri Mac Murchada, beserta hak waris atas Kerajaan Leinster (Ronan McGreevy 2019).

Berawal dari undangan aliansi tersebut, kehadiran pihak Norman pada akhirnya bermanifestasi menjadi ambisi ekspansionis untuk membangun struktur kekuasaan feodal di Irlandia. Bagi koalisi Anglo-Norman, signifikansi Dublin dalam invasi tahun 1169 terletak pada fungsinya yang ganda, yaitu sebagai basis operasi militer sekaligus pusat kemakmuran ekonomi. Dublin sebagai Kota Pelabuhan menjadi kunci untuk mengamankan akses logistik melalui jalur laut dan sebagai sumber kekayaan untuk mendanai ekspansi jangka panjang.

Akses Dublin terhadap rute perdagangan laut menyediakan stabilitas ekonomi dan logistik yang krusial bagi ambisi feodal Bangsa Norman. Di sisi lain, bagi Mac Murchada, penaklukan Dublin adalah upayanya untuk membalas dendam atas penolakan terhadap otoritasnya pada tahun 1166 (Noel E. French 2015, 23). Setelah pasukan Anglo-Norman menginjakkan kaki di Irlandia pada akhir dekade 1160-an tepatnya pada tahun 1170, *Strongbow* berhasil menaklukkan bagian-bagian penting Leinster, termasuk Dublin. Disusul penaklukan sebagian wilayah Timur dan Selatan Irlandia pada tahun 1171. Pada tahun yang sama, Mac Murchada meninggal dan menjadi figur yang dibenci serta simbol pengkhianat di Irlandia (Ronan McGreevy 2019).

Keberhasilan *Strongbow* dan pasukannya dalam menaklukkan wilayah-wilayah di Irlandia memunculkan kekhawatiran Inggris. Kekhawatiran akan terbentuknya “Kerajaan Norman baru” yang berpotensi menyaingi kekuasaan Inggris, hingga kemudian mendorong Raja Henry II untuk datang ke Dublin untuk membatasi pergerakan bangsawan di Irlandia dan memaksa *Strongbow* untuk menyerahkan Dublin kepada kekuasaan Inggris pada 11 November 1171 (Noel E. French 2015, 25). Sejak saat itu, status Irlandia berubah secara signifikan, dari yang sebelumnya sebagai wilayah yang diserbu pasukan bayaran menjadi wilayah pribadi milik raja atau yang dalam literature disebut sebagai peralihan dari semi-independent Hiberno-Norse statelet menjadi personal demesne of the king of England sekaligus pusat administrasi regional Inggris di Irlandia (*royal demesne*) (Noel E. French 2015, 29).

Periode peralihan kekuasaan dari *Strongbow* kepada Raja Henry II secara krusial mengubah Dublin menjadi pusat kekuatan kolonial Inggris. Melalui penerbitan piagam kerajaan, Inggris mulai melancarkan kolonisasi wilayah Irlandia secara lebih terstruktur dan menetakannya sebagai wilayah milik pribadi (Noel E. French 2015). Henry II tidak menyebut dirinya sebagai *lord* ataupun Raja Irlandia, tetapi di waktu yang bersamaan dia memegang kendali atas Dublin dengan menetapkan Dublin dan sekitarnya sebagai tanah kerajaan. Henry II juga menyerahkan Dublin untuk dihuni orang-orang Bristol dan memberikan kebebasan seperti di Bristol melalui piagam pertama yang dikeluarkannya.

Piagam ini juga bertujuan untuk mendorong perdagangan dan menarik pedagang dari Bristol. Lebih lanjut, orang-orang Bristol yang datang ke Dublin sebagai pemukim diberi kebebasan bea cukai untuk menarik minat mereka pindah

dari Inggris dan Wales (Noel E. French 2015, 25). Praktik kolonial ini menunjukkan bahwa dominasi Inggris di Irlandia tidak hanya bersifat militer, tetapi juga demografis dan administratif, sebuah pola yang kelak menjadi ciri khas kolonialisme pemukim di berbagai wilayah lain. Pondasi administratif ini kemudian berkembang menjadi praktik kolonial yang lebih luas dan sistematis, termasuk pengusiran paksa penduduk asli, pembangunan pemukiman pendatang (*settler plantation*), dan upaya penghapusan budaya asli. Irlandia bahkan diposisikan sebagai laboratorium—ruang uji coba sebelum kebijakan serupa diekspor ke berbagai wilayah imperium Inggris lainnya (Browne 2024, 94).

Setelah administrasi berpusat di Dublin, Inggris mulai mengalihkan kepemilikan tanah secara sistematis dari penduduk asli ke pemukim Inggris dan Skotlandia. Inggris menyita jutaan hektar tanah subur dan memberikannya kepada para “*undertakers*” atau pendukung setia kerajaan (Dean M. Braa 1997, 196). Selain itu, praktik kolonial paling ekstrim yang dilakukan oleh Inggris adalah ketika ribuan petani Irlandia secara paksa dipindah ke wilayah Barat, Connaught yang tanahnya berbatu dan tidak subur. Peristiwa ini merujuk pada kampanye militer dan politik yang dilakukan oleh Oliver Cromwell di Irlandia pada abad ke-17. Awalnya pada tahun 1649, Cromwell dan pasukannya menginvasi Irlandia dengan tujuan penaklukan dan pacisifikasi wilayah.

Setelah berhasil menakhlukkan Galway pada tahun 1652, ribuan petani Irlandia dipaksa pindah dari tanah mereka dan ditempatkan di daerah marjinal seperti Connaught. Peristiwa ini dikenal sebagai *Cromwellian Settlement* dan tujuan dari settlement ini adalah untuk menciptakan kelas penguasa Protestan Inggris dan mengurangi kekuatan bangsa Irlandia serta untuk mendukung

penguasaan kolonial Inggris di wilayah tersebut. Ribuan petani yang terpaksa pindah harus menyesuaikan diri dengan tanah yang kurang subur dan pola produksi yang berbeda, sehingga mengubah struktur sosial dan ekonomi Irlandia secara signifikan. Operasi yang dilancarkannya dikenal sangat kejam dan keras karena turut menindas masyarakat sipil (Dean M. Braa 1997, 197).

Akumulasi praktik kolonial Inggris, mulai dari pembentukan sistem feodal, perampasan tanah, pemindahan paksa, *settler plantation* hingga upaya penghapusan budaya lokal secara bertahap membentuk kondisi sosial dan politik yang sarat akan ketimpangan. Ketidakadilan struktural akibat perampasan tanah dan relokasi paksa ke lahan yang jauh dari kata layak untuk ditinggali tidak hanya berakibat memperlemah legitimasi kekuasaan Inggris, tetapi juga mendorong munculnya tuntutan kemerdekaan yang terbuka dari kalangan masyarakat Irlandia (Dean M. Braa 1997, 198). Kondisi ini kemudian melatarbelakangi pecahnya *the Irish War of Independence* 1919-1921, ditandai dengan konfrontasi langsung antara gerakan nasionalis Irlandia dan otoritas kolonial Inggris.

The Irish War of Independence 1919-1921 dimulai dengan kemenangan mutlak dari partai Sinn Fein pada pemilihan umum Desember 1918. Dengan memposisikan Irlandia secara *de jure* sebagai bangsa yang merdeka, Sinn Fein menolak untuk menduduki kursi Parlemen Inggris dan memilih langkah berani dengan mendirikan Parlemen independen di Dublin, *Dáil Éireann* (Giovanni Costigan 1968, 69). Kemudian, pada 21 Januari 1919, *Dáil Éireann* secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Republik Irlandia dan menyatakan bahwa pemerintahan asing, seperti Inggris di Irlandia merupakan pelanggaran hak nasional yang tidak dapat ditoleransi.

Konflik tidak berlangsung dalam bentuk perang konvensional karena *Dáil Éireann* tidak pernah mengeluarkan deklarasi perang formal terhadap Inggris. Yang terjadi adalah strategi perang gerilya oleh *Irish Republican Army* (IRA) di bawah koordinasi Michael Collins. Target utama IRA adalah *Royal Irish Constabulary* (RIC) dan simbol-simbol otoritas administrasi Inggris (Roland Martin 2025). Pemerintah Inggris merespon IRA secara represif dengan mengerahkan pasukan tambahan yang dikenal sebagai *Black and Tans* dan *Auxiliaries*, yang kemudian menjadi simbol kekerasan negara terhadap masyarakat Irlandia (Roland Martin 2025). *Black and Tans* adalah korps veteran Perang Dunia I yang diintegrasikan ke dalam kepolisian Inggris mulai tahun 1920 untuk memerangi pejuang kemerdekaan Irlandia, mereka terkenal akan tindakan brutalnya terhadap sipil yang tidak terlibat langsung dalam perlawanan bersenjata (Amandine Hess 2025).

Dengan menerapkan metode teror yang terorganisir, *Black and Tans* menggunakan masyarakat sipil sebagai benteng untuk menghindari penyerangan oleh IRA, hingga pemaksaan informasi melalui ancaman kekerasan (Giovanni Costigan 1968, 83). Bukti nyata brutalitas *Black and Tans* yang sangat membekas dalam ingatan masyarakat Irlandia adalah tragedi *Bloody Sunday* 1920 di Stadion Croke Park. Setidaknya 12 orang tewas dan 60 orang lainnya luka-luka akibat serangan yang diluncurkan oleh *Black and Tans* di tengah-tengah kerumunan massa sebagai respon terbunuhnya agen intelijen Inggris oleh kelompok gerilya Michael Collins, IRA (Giovanni Costigan 1968, 78).

Aksi brutal ini membentuk dukungan kuat masyarakat untuk mencapai kemerdekaan dan memicu perubahan opini publik internasional, termasuk di

Amerika Serikat dan Inggris sendiri (Roland Martin 2025). Karakter penjajahan Inggris semakin terlihat ketika metode-metode tidak manusiawi beserta pasukan yang melakukannya diekspor ke wilayah imperium Inggris lainnya, salah satunya adalah Palestina. Sejumlah anggota dari *Black and Tans*, termasuk komandannya Jenderal Hugh Tudor, direkrut ke dalam kepolisian Mandat Palestina (Giovanni Costigan 1968, 66). Perjuangan kemerdekaan Irlandia tidak diakui oleh Pemerintah Inggris dan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lloyd George, pejuang kemerdekaan Irlandia dilabeli sebagai “*Murder gang*” atau geng pembunuh untuk mendelegitimasi perjuangan mereka.

Pola stigmatisasi terhadap pejuang kemerdekaan ini kemudian diimplementasikan dalam menghadapi perlawanan di Palestina (Giovanni Costigan 1968, 71). Peristiwa tersebut memperkuat analogi antara pengalaman Irlandia pada awal tahun 1920-an dan Palestina pada tahun 1930-an, yang ditandai dengan praktik kekerasan oleh negara, pembalasan aksi kolektif terhadap masyarakat sipil, dan delegitimasi perlawanan digunakan sebagai instrumen utama pengendalian kolonial. *The Irish War of Independence* berakhir dengan gencatan senjata pada Juli 1921 dan diikuti dengan disepakatinya *Anglo-Irish Treaty* pada Desember 1921.

Pembahasan ini tidak bertujuan untuk menguraikan sejarah Irlandia secara komprehensif, melainkan menyoroti pola kolonialisme, dan perlawanan yang membentuk memori kolektif masyarakat Irlandia sehingga relevan dengan pengalaman Palestina. Dalam konteks ini, pengalaman Palestina di bawah Mandat Inggris kemudian menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan pola

kolonialisme yang serupa meskipun dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda.

2.1.2 Palestina di bawah Jajahan Inggris dan Zionis

Sementara Irlandia berjuang untuk memisahkan diri dari kekuasaan Inggris pada awal abad ke-20, Inggris secara paralel mulai membangun pondasi kekuasaannya di Timur Tengah melalui instrumen hukum internasional. Titik awal keterlibatan Inggris di Palestina berkaitan erat dengan perubahan geopolitik global pasca Perang Dunia I. Kekalahan blok sentral memaksa Turki Utsmani untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya, termasuk Palestina, kepada negara-negara sekutu. Sebelum kekalahan tersebut, Inggris dan Prancis telah lebih dahulu menyusun pembagian wilayah peninggalan Utsmani melalui Perjanjian Sykes-Picot pada 16 Mei 1916.

Melalui Perjanjian Sykes–Picot, Inggris mendapatkan kendali atas Palestina dan menjadi dasar kendali Inggris atas Palestina yang kemudian dilembagakan secara formal melalui sistem Mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) (Shamir Husan 2014, 970). Dominasi Inggris di Palestina semakin menguat setelah kemenangan militer Inggris yang dipimpin oleh Sir Edmund Allenby, yang menandai bahwa Inggris menguasai Palestina secara *de jure* pada 4 Desember 1917. Kontrol Inggris tidak hanya dijalankan secara militer, tetapi juga melalui instrumen politik yang kemudian berkembang menjadi akar konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Melalui sistem Mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa, Inggris memperoleh legitimasi internasional untuk mengadministrasikan wilayah Palestina. Namun,

mandat ini jauh dari sifat netral, dan sengaja dirancang untuk mengamankan kepentingan geopolitik dan ekonomi Inggris di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks Mandat Palestina, Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menjanjikan pembentukan “*Jewish National Home in Palestine*” atau rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina (Shamir Husan 2014, 969).

Janji pembentukan rumah bagi bangsa Yahudi lahir sebagai bagian dari strategi politik Inggris untuk mengamankan dukungan internasional, khususnya dari komunitas Yahudi di Amerika Serikat, serta sebagai bentuk balas budi atas dukungan terhadap Inggris selama Perang Dunia I. Lebih lanjut, janji tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kedaulatan penuh atas tanah Palestina kepada bangsa Yahudi. Namun, bangsa Yahudi menganggap deklarasi tersebut sebagai harapan untuk pembentukan negara mereka di wilayah Palestina yang kemudian memicu kemarahan bangsa Arab di Palestina dan menjadi awal mula konflik perebutan wilayah (Aswar 2024, 2).

Konflik tersebut semakin berkepanjangan pasca peristiwa pembantaian massal bangsa Yahudi oleh partai Nazi dan Hitler, atau disebut sebagai *Holocaust* yang terjadi selama Perang Dunia II, sehingga migrasi bangsa Yahudi ke wilayah Palestina menjadi tidak terbendung dan membuat situasi menjadi semakin kompleks. Menghadapi situasi rumit yang melibatkan dua bangsa, tekanan dari Amerika Serikat, dan ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak, Pemerintah Inggris kemudian menyerahkan Mandat Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mendapatkan solusi yang efektif pada tahun 1947 (Shamir Husan 2014, 973).

Merespon hal tersebut, PBB membentuk *United Nations Special Committee on Palestine* (UNSCOP), sebuah badan khusus untuk menangani konflik Palestina dan merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua, yaitu wilayah untuk Arab Palestina dan Yahudi. Rekomendasi tersebut diterima dengan tangan terbuka oleh pihak Yahudi dan ditolak keras oleh masyarakat Arab Palestina. Terlepas dari penolakan tersebut, pemimpin Zionis, David Ben-Gurion mendeklarasikan pendirian negara Israel di Palestina pada 14 Mei 1948. Deklarasi ini diikuti oleh konflik bersenjata antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya.

Dampak signifikan dari pendirian negara Israel adalah tragedi Nakba 1948. Setidaknya 750.000 masyarakat Palestina dipaksa untuk meninggalkan rumah beserta tanah mereka dalam kurun waktu 1947-1949. Tidak hanya dipaksa meninggalkan tempat asalnya, 78 persen dari wilayah Palestina kemudian dikuasai oleh kelompok Zionis untuk dibangun menjadi pemukiman bagi mereka, sementara wilayah yang tersisa terbagi menjadi Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, lebih dari 530 kota dan desa Palestina dihancurkan dengan menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan sebagian besar masyarakat yang tersisa hidup sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan di negara-negara tetangga dan di kamp-kamp pengungsian (Aswar 2024, 4).

Penderitaan masyarakat Palestina masih berlangsung sampai masa kini meskipun kekuasaan Inggris secara formal berakhir pada tahun 1948. Deklarasi Israel sebagai negara, dan tragedi Nakba menciptakan konflik berkepanjangan yang ditandai dengan sengketa wilayah di kemudian hari, krisis yang dihadapi masyarakat Palestina sebagai pengungsi, serta ketimpangan kekuasaan antara

Israel dan Palestina. Dalam dekade-dekade berikutnya, konflik terus bergulir dan semakin memanas hingga beberapa kali mengalami berbagai eskalasi, seperti terjadinya gerakan intifada, dan blokade wilayah Gaza, dan puncaknya adalah peristiwa 7 Oktober 2023.

Situasi tersebut menunjukkan warisan kolonial yang tidak hanya melahirkan konflik teritorial yang temporer, tetapi jauh lebih daripada itu. Lahir penderitaan lainnya, ketimpangan kekuasaan yang berkelanjutan, penderitaan tiada akhir, dan sulitnya mencapai kesepakatan bagi kedua belah pihak melalui jalur diplomasi, hingga akhirnya perjuangan tumpah darah tidak terelakkan. Eskalasi konflik mencapai titik krusial pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok Hamas melancarkan serangan bersenjata ke wilayah Israel. Serangan ini kemudian direspon dengan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza yang masih berlangsung sampai saat ini sehingga berdampak luas terhadap populasi sipil dan infrastruktur.

Eskalasi konflik ini juga memicu angka kematian korban yang signifikan, kehancuran fasilitas publik, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan di wilayah Gaza. Berbeda dengan eskalasi yang pernah terjadi sebelumnya, konflik pasca 7 Oktober 2023 berlangsung dalam skala intensitas dan durasi yang lebih tinggi disertai dengan perhatian dunia internasional. Peristiwa 7 Oktober 2023 memantik perhatian dunia internasional untuk bangkit dan bersuara atas kebenaran yang selama ini terkubur dalam sunyi.

Gelombang solidaritas terhadap Palestina menggebu-gebu di seluruh dunia, termasuk di Irlandia. Reaksi masyarakat Irlandia terhadap peristiwa tersebut tidak lepas dari memori mereka akan penjajahan dan perjuangan kemerdekaan yang pernah mereka alami sendiri. Kondisi ini menjadi cikal bakal

kemunculan mobilisasi solidaritas yang dipimpin oleh masyarakat sipil dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC).

2.1.3 Paralel Sejarah Kolonialisme Irlandia dan Palestina

Sejak tahun 1950-an, Republik Irlandia telah mendukung perjuangan Palestina dan dukungan tersebut semakin menguat hingga sekarang, baik di tingkat nasional hingga di tingkat internasional. Ikatan yang kuat antara kedua negara didasarkan pada pengalaman sejarah bersama akan kolonialisme dan pendudukan. Dukungan besar terhadap perjuangan masyarakat Palestina kemudian memengaruhi posisi kebijakan luar negeri Irlandia. Bagi masyarakat Irlandia, kesadaran akan pentingnya solidaritas ini berakar pada pengalaman historis mereka sendiri. Kenangan akan konflik berkepanjangan sebelum tercapainya kemerdekaan melekat kuat dalam ingatan kolektif mereka. Ketika masyarakat Irlandia melihat penindasan yang dialami oleh Palestina pada masa kini, membangkitkan memori akan kekerasan dan ketidakadilan yang mereka saksikan pada masa konflik sektarian. Status Irlandia sebagai negara eks-koloni serta pengalamannya menghadapi kekuatan penjajahan membentuk cara pandang mereka terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina (Anna Johnson 2023).

Tragedi Nakba 1948 memiliki kemiripan historis dengan praktik kolonial Inggris di Irlandia, yaitu kebijakan Cromwellian pada abad ke-17 yang memaksa ribuan petani Irlandia untuk berpindah ke wilayah barat, Connaught. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan pola kolonial yang serupa, seperti pengusiran paksa penduduk asli, perampasan tanah untuk kemudian diberikan kepada pendatang untuk bermukim (Dean M. Braa 1997, 196). Kesamaan pengalaman ini

berkontribusi membentuk memori kolektif bagi masyarakat Irlandia. Meskipun kedua kasus memiliki konteks sejarah yang berbeda, kesamaan pola kolonial memperlihatkan mekanisme kekuasaan imperium yang berulang dan menjadi faktor yang mendorong solidaritas yang tumbuh subur di hati masyarakat Irlandia terhadap perjuangan di Palestina.

Selain Tragedi Nakba 1948 dan *Cromwellian Settlement*, keterhubungan antara Irlandia dan Palestina ditunjukkan juga dalam keberlanjutan metode represif yang diterapkan oleh kekuasaan Inggris. Praktik kekerasan yang digunakan untuk menekan perlawanan di Irlandia tidak berhenti di sana, melainkan diwariskan ke Palestina sebagai wilayah imperium Inggris lainnya. Sejumlah pasukan *Black and Tans* direkrut ke dalam struktur kepolisian Mandat Palestina, termasuk komandan pasukan, Hugh Tudor yang memiliki peran penting dalam mengatur pasukannya di Palestina (Giovanni Costigan 1968, 66). Keterlibatan personel dan pasukan yang sama dalam dua konteks penjajahan dengan wilayah yang berbeda membuktikan bahwa ikatan antara Irlandia dan Palestina tidak hanya terletak pada pengalaman sebagai bangsa yang dijajah oleh Inggris, tetapi juga pada sirkulasi praktik dan metode kekerasan serupa yang dirasakan keduanya. Paralel sejarah Irlandia dan Palestina lainnya ditunjukkan dengan kesamaan pola delegitimasi perjuangan kemerdekaan oleh Inggris. Baik masyarakat Irlandia maupun Palestina mengalami kriminalisasi ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Inggris dengan sengaja memberi label buruk terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan, seperti menyebut mereka sebagai '*murder gang*', terorisme hingga pemberontak (Giovanni Costigan 1968, 71).

Kesamaan lainnya terlihat jelas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh masyarakat Irlandia dan Palestina selama menjadi tahanan Inggris. Pengalaman tersebut tertulis dalam catatan dan surat-surat yang mereka tulis dan kemudian menjadi bukti-bukti tidak terbantahkan bahwa dua bangsa ini berbagi nasib yang sama di bawah Inggris. Bukti-bukti tersebut berhasil diselamatkan dan diabadikan di Museum Abu Jihad, Universitas Al-Quds, Abu Dis, Jerusalem (Browne 2024, 94). Sebuah buku yang berjudul *A Shared Struggle* karya Norma Hashim dan Yousef M. Al-Jamal, menggambarkan paralel historis antara Irlandia dan Palestina. Buku ini mengkaji pengalaman kolektif kedua bangsa dalam menghadapi penindasan kolonial dan menyoroti kesamaan penggunaan sistem penjara sebagai instrumen kontrol terhadap masyarakat sipil, di mana narapidana dari Irlandia dan Palestina mengalami praktik kekerasan struktural, kriminalisasi perlawanan, serta pembatasan hak-hak dasar yang sama (Ramona Wadi 2021). Lebih dalam lagi, buku ini juga menyoroti Arthur Balfour sebagai mimpi buruk bagi Irlandia dan Palestina, aksi mogok makan oleh masyarakat Palestina dan Irlandia, serta hubungan erat yang telah lama terjalin oleh gerakan perlawanan Irlandia yang diwakili oleh IRA dengan *Palestine Liberation Organization* (PLO) di Lebanon pada tahun 1970-an dan 1980-an (Yousef M. Al-Jamal 2022, 229).

Dari kesamaan yang disebutkan, konflik yang dialami Irlandia dan Palestina menunjukkan kesamaan dalam hal motivasi dan tujuan, yakni mempertahankan eksistensi serta memperjuangkan kedaulatan bangsa. Kesamaan pengalaman historis tersebut membuat banyak dari masyarakat Irlandia merasa bahwa sejarah mereka tercermin dalam perjuangan Palestina. Pengalaman

kolonial yang dialami Irlandia melahirkan rasa empati yang secara alamiah terhadap bangsa-bangsa lain yang merasakan penjajahan. Kesadaran akan pengalaman bersama ini kemudian memperkuat solidaritas antara kedua bangsa, melampaui perbedaan bahasa, budaya, agama, dan melahirkan rasa keterhubungan yang mendalam. Solidaritas merupakan bagian dari “*Unfinished Revolutions*,” di mana warisan kolonial Inggris membentuk lanskap politik Irlandia, terutama di wilayah Utara. Oleh karena itu, hubungan Irlandia dan Palestina bukan hubungan simbolis semata, melainkan berakar dari sejarah bersama mengenai kekerasan dan dominasi penjajah. Solidaritas Irlandia terhadap Palestina dipimpin oleh semangat dari gerakan akar rumput (*grassroots driven*). (Browne 2024).

2.2. Gerakan Solidaritas di Irlandia dan Profil *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC)

2.2.1 Gerakan Solidaritas di Irlandia

Solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada pengalaman historis Irlandia sendiri ketika di bawah kolonialisme Inggris. Kesamaan pengalaman tersebut memungkinkan masyarakat Irlandia untuk dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan perjuangan rakyat Palestina. Seperti yang diungkapkan oleh Conor McCarthy, masyarakat Irlandia melihat tindakan yang dialami oleh Palestina saat ini sebagai sesuatu yang pernah mereka alami di masa lalu, sehingga membentuk perasaan kedekatan emosional yang kuat (Bill Rolston 2025).

Keterkaitan antar kedua bangsa ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga bersandar pada pengalaman historis yang memiliki kemiripan. Misalnya,

seperti yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kedua bangsa mengalami genosida yang disebabkan oleh kelaparan yang disengaja, kriminalisasi perjuangan, pengusiran paksa dan yang lainnya. Pengalaman-pengalaman ini membentuk memori kolektif yang kemudian memunculkan perasaan empati terhadap situasi di Palestina. Mayoritas opini masyarakat Irlandia sejak tahun 1960-an menunjukkan dukungan kepada Palestina dan menentang Israel, kebijakan Irlandia jelas lebih menampakkan keberpihakan kepada Palestina dibanding negara-negara Eropa lainnya (Fred Halliday 1988).

Berangkat dari kesamaan pengalaman historis, masyarakat Irlandia bergerak membentuk dukungan nyata melalui berbagai gerakan solidaritas yang dipimpin oleh semangat akar rumput. Ditambah kenyataan bahwa meski pemerintah Irlandia terlihat lebih vokal daripada pemerintah negara Eropa lainnya dalam mengutuk tindakan Israel, pernyataan retorik yang memberi kesan carian aman hanyalah pernyataan yang performatif (Browne 2024, 97). Sehingga masyarakat harus bangkit dan tidak bisa diam saja. Dalam perkembangannya, berbagai kelompok solidaritas ini kemudian saling berhubungan satu sama lain dan menjalin koalisi pro-Palestina dan gerakan anti-*apartheid* di Irlandia. Gerakan solidaritas masyarakat Irlandia terhadap Palestina berkembang dalam bentuk jaringan yang luas dan beragam, sebagian besar dipimpin oleh gerakan berbasis akar rumput yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dukungan ini tidak hanya datang dari organisasi solidaritas khusus, namun juga melibatkan serikat pekerja, kelompok keagamaan, serta komunitas akademisi. keberagaman aktor ini mencerminkan bahwa isu Palestina menjadi perhatian lintas kelompok masyarakat di Irlandia.

Berbagai gerakan lahir sebagai bukti nyata dukungan terhadap Palestina, di antaranya adalah *Trade Union Friends of Palestine* (TUFP) yang membawa isu Palestina ke dalam gerakan buruh dan pekerja karena TUFP adalah jaringan di Irlandia yang didirikan oleh Komite Irlandia Utara dari Kongres Serikat Pekerja Irlandia—*the Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Union* (NIC-ICTU) (“Campaigns - Irish National Teachers Organization” 2023).

Selanjutnya, keterlibatan kelompok berbasis identitas dan keagamaan juga memperkuat dimensi moral dalam gerakan ini, *Trocaire* atau yang dalam bahasa Irlandia berarti “belas kasih”. Sesuai namanya, *Trocaire* adalah organisasi nonpemerintah internasional (INGO) yang bergerak untuk mendukung orang-orang dalam kemiskinan, konflik, dan ketidakadilan. Didirikan pada tahun 1973 oleh para Uskup Katolik Irlandia. *Trocaire* mendukung terciptanya dunia yang adil dan damai tanpa memandang budaya, suku, jenis kelamin, dan agama. *Trocaire* secara aktif mengadakan kampanye dukungan terhadap Palestina (Trocaire, n.d.)

Di tingkat mahasiswa dan komunitas akademisi, hadir *Trinity College Dublin* (TCD) yang menyerukan kampanye boikot dan edukasi publik. TCD menjadi universitas pertama di Eropa yang secara resmi memutuskan hubungan dengan Israel (AFP 2025). Langkah berani yang dilakukan oleh TCD adalah hasil dari proses panjang semangat mahasiswa disertai dengan dukungan dari pegawai dan serikat pekerja di sana, serta tekanan dari gerakan akar rumput.

Dari kelompok-kelompok tersebut, *Ireland Palestine Solidarity Campaign* hadir sebagai salah satu organisasi yang paling aktif dan terorganisir dalam memobilisasi solidaritas terhadap Palestina. Dibuktikan dengan persebaran

jaringan yang hampir hadir di seluruh wilayah Irlandia, dibersamai dengan konsistensi dalam melakukan aksi dan arsip acara yang diperbarui secara berkala di website mereka. Melihat beberapa organisasi independen lainnya lebih banyak berfokus pada isu hak asasi manusia secara luas, atau kemiskinan. Ketika membaca artikel yang membahas gerakan solidaritas Irlandia terhadap Palestina, aksi yang IPSC sering menjadi rujukan, contohnya dalam artikel “*Why Ireland is one of the most pro-Palestine nations in the world*” yang terbit pada Maret 2024 (Frayner and Al-Kassab 2024).

Jaringan aktivisme solidaritas terhadap Palestina di Irlandia tersebar begitu luas, melampaui batas yang memisahkan dua wilayah, dan terdiri dari organisasi advokasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat pekerja, jaringan akademik, organisasi antaragama, serikat mahasiswa, aktivis personal, kelompok budaya, tim olahraga, serta partai berhaluan kiri. Setidaknya 23 dari kelompok-kelompok ini bersatu dalam naungan *The Irish Anti-Apartheid Campaign for Palestine* (IAAC-P) bekerja sama untuk mengakhiri rezim apartheid Israel (Amnesty International Ireland, n.d.).

2.2.2 *Profil Ireland Palestine Solidarity Campaign*

Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) adalah organisasi independen, nirlaba, nonpartai yang didirikan pada akhir tahun 2001. IPSC dibentuk oleh sekelompok aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan jurnalis Irlandia, yang bekerja sama dengan diaspora Palestina yang tinggal di Irlandia, dengan tujuan utama memberikan ruang bagi mereka di Irlandia (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a). IPSC dikenal sebagai kelompok yang paling aktif

dalam memobilisasi gerakan solidaritas terhadap Palestina dengan cabang di hampir seluruh wilayah di Irlandia (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-c).

Tujuan pembentukan IPSC adalah untuk memobilisasi dukungan di Irlandia untuk memperjuangkan hak-hak politik, sipil, dan hak asasi manusia, termasuk implementasi penuh *Right of Return* bagi pengungsi Palestina beserta anak cucu mereka. Agenda utama IPSC berpusat pada upaya peningkatan kesadaran publik akan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, dan akar historis yang mendasari konflik Israel-Palestina. Dalam kerangka operasionalnya, IPSC melakukan lobi secara intensif terhadap Pemerintah Irlandia dan Uni Eropa. Selain itu, IPSC memiliki posisi sebagai aktor penting dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan kampanye *Boycott, Divestment, Sanctions Movement* (BDS) di Irlandia. *BDS Movement* menjadi strategi nirkekerasan yang terinspirasi oleh gerakan anti-*apartheid* di Afrika Selatan, dengan tujuan spesifik untuk mengakhiri keterlibatan negara, institusi, dan bisnis Irlandia terhadap apa yang didefinisikan sebagai rezim *apartheid* Israel dan tindakan genosida (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a).

Agenda lapangan yang dilakukan oleh IPSC mencakup mobilisasi massa, baik secara langsung di jalan maupun daring, aktif menyelenggarakan diskusi publik yang menggandeng pembicara diaspora Palestina dan Israel, pemutaran film, serta inisiasi kegiatan budaya yang berperan sebagai medium pendidikan sekaligus galang amal. IPSC dikenal sebagai kelompok yang paling aktif memimpin gerakan solidaritas Irlandia terhadap Palestina dan memiliki cabang di hampir semua kota di Irlandia (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-c). IPSC dianggap efektif dalam membangun hubungan dengan masyarakat sipil,

terutama dengan serikat pekerja untuk dapat mendukung kampanye yang dibawa oleh IPSC, terutama selama masa agresi militer di Gaza. Bersama gerakan solidaritas lainnya, IPSC unggul dalam menggunakan Twitter sebagai alat yang menghubungkan aktivis di Irlandia dengan narasumber di Palestina, selanjutnya menyebarkan berita akan situasi terbaru ke publik luas melalui semua platform media sosial IPSC, dan berdasarkan hal tersebut kemudian IPSC mengorganisir aksi lapangan kedepannya (Shadi Abu-Ayyash 2015).

BAB 3

UPAYA *FRAMING* IRELAND PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN

(IPSC) DALAM MEMOBILISASI SOLIDARITAS TERHADAP

PALESTINA 2023-2024

Bab ini akan membahas upaya yang telah dilakukan oleh *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) sepanjang 2023–2024 menggunakan *framing theory* yang dikembangkan oleh Snow dan Benford. Terdapat 3 pilar utama *framing* yang pertama, *diagnostic framing*, IPSC mengidentifikasi akar konflik di Palestina dan menetapkan aktor yang bertanggung jawab atas konflik, yang kedua, *prognostic framing*, IPSC menawarkan strategi aksi juga solusi, dan yang terakhir, *motivational framing*, yang mana pada tahap ini IPSC membentuk seruan dan motivasi untuk menarik partisipasi masyarakat luas. Kombinasi antara *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing* berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kesadaran dengan tindakan, yang mana pemahaman akan suatu isu secara bertahap diubah menjadi dorongan untuk turut berpartisipasi dalam gerakan sosial (Buechler 2000, 655). *Framing* dalam gerakan sosial merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan sosial dan pengalaman dengan audiens. Dalam upaya memperluas dukungan, gerakan sosial cenderung menyesuaikan *framing* yang diangkat dengan nilai dan pengalaman target audiens (Rory McVeigh et al. 2004). Analisis upaya mobilisasi solidaritas di Irlandia oleh IPSC sepanjang 2023-2024 diteliti secara mendalam berdasarkan laman IPSC bagian *past events*.

Sepanjang periode 2023-2024, *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) telah menyelenggarakan setidaknya 170 agenda publik, dengan rincian 78 kegiatan pada tahun 2023 dan 92 kegiatan pada 2024 (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d). Kegiatan tersebut mencakup demonstrasi nasional, aksi protes politik, forum edukatif, kegiatan ragam budaya, serta penggalangan dana sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d). Pada tahun 2023, pola mobilisasi IPSC cenderung berupa rutinitas solidaritas, seperti peringatan peristiwa Nakba, Sabra dan Shatila, disertai juga dengan diskusi dan edukasi publik lainnya. Intensitas aktivitas IPSC relatif stabil pada Januari hingga September 2023, dengan rata-rata enam kegiatan setiap bulannya.

Perubahan signifikan terjadi pasca eskalasi konflik 7 Oktober 2023. Sejak 11 Oktober 2023, IPSC mulai menginisiasi serangkaian aksi darurat yang berlangsung secara serentak di berbagai kota di Irlandia, seperti Waterford, Limerick, Naas, Dublin, serta di sejumlah kota lainnya. Mobilisasi aksi ini berlangsung hampir setiap hari dalam satu minggu, dan berlanjut hingga bulan-bulan selanjutnya menandai pergeseran pola dari yang sebelumnya berupa solidaritas rutin menjadi respon krisis yang intens dan terkoordinasi. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berupa demonstrasi di jalanan, tetapi juga diselingi dengan agenda doa bersama, penggalangan dana, serta forum diskusi publik. Setelah fase darurat tersebut, mobilisasi berlanjut dalam bentuk demonstrasi nasional yang diselenggarakan secara berkala, menunjukkan bahwa eskalasi 7 Oktober 2023 menjadi titik balik dalam peningkatan intensitas dan skala gerakan solidaritas IPSC (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d).

Memasuki tahun 2024, pola mobilisasi IPSC menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan dibandingkan fase darurat pada akhir 2023. Berkaca dari respon pada Oktober–Desember 2023, di mana mobilisasi aksi bersifat responsif terhadap eskalasi konflik, maka sepanjang 2024 muncul konsolidasi gerakan dalam berbagai bentuk aksi yang lebih sistematis. Demonstrasi nasional untuk Palestina secara rutin dilakukan tiap bulannya dengan tuntutan yang lebih spesifik, seperti desakan untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel, penghentian pengiriman senjata melalui Irlandia, serta dorongan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas di tingkat internasional.

Pola mobilisasi IPSC pada tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan strategi dalam merespons situasi darurat. Aksi massa menjadi elemen utama dilengkapi dengan upaya advokasi pemerintah, kampanye boikot, hingga ragam kegiatan edukasi dan kebudayaan untuk menjangkau lebih banyak partisipasi publik. Seluruh agenda dan kegiatan IPSC secara berkala diperbarui di website IPSC di bagian *events*, khususnya *recent past events*. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pola komunikasi suatu gerakan, termasuk bagi IPSC yang secara rutin mengunggah semua info terkait agenda yang akan datang di laman website dan sosial media IPSC (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d).

3.1. Diagnostic Framing

Gerakan sosial pada dasarnya muncul untuk mengubah kondisi yang dianggap bermasalah dan bagaimana gerakan tersebut menjelaskan penyebab dan siapa yang dianggap bertanggung jawab menjadi penting karena menentukan

keterlibatan audiens luas. Tahapan pertama dalam tiga pilar utama *framing* menurut Snow dan Benford adalah *diagnostic framing*. *Diagnostic framing* berfungsi untuk mengidentifikasi suatu situasi atau masalah sosial, menentukan sumber penyebabnya, dan melakukan atribusi kesalahan agar muncul pemahaman kolektif mengenai urgensi isu tersebut (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 616). Tahap ini menjadi krusial karena berfungsi sebagai dasar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu masalah.

Pada tahap *diagnostic framing*, IPSC mengidentifikasi konflik di Palestina sebagai situasi yang lebih dari sekadar konflik teritorial, yaitu sebagai cerminan dari praktik *apartheid*, genosida, kejahatan perang, dan *settler-colonialism* yang berakar dari ideologi Zionisme (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a). Hal ini secara langsung juga diungkapkan oleh Sean Mary, perwakilan IPSC dalam pertanyaannya kepada para kandidat partai yang hadir pada agenda *General Election Hustings on Housing, the Climate Crisis and Palestine*, November 2024, “Apa yang sebenarnya akan Anda lakukan untuk membantu mengatasi rezim penindasan, apartheid, kolonialisme pemukim, dan genosida yang dilakukan Israel di Palestina?” (IrelandPSC 2024a). Selain itu, pendudukan di wilayah Tepi Barat, kontrol atas Jalur Gaza, serta ekspansi pemukiman ilegal dipandang sebagai penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Palestina (Shadi Abu-Ayyash 2015). Penggunaan terminologi ‘*apartheid*’ dalam konteks Palestina merujuk pada sistem kolonial dan segregasi terhadap masyarakat Palestina yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 1967 (Amandine Hess 2025).

Gambar 1. Poster Penyelenggaraan Diskusi oleh IPSC



Sumber: IPSC (November 2024)

Lebih lanjut, pemahaman yang dibangun oleh IPSC dipengaruhi oleh dinamika konflik di Palestina sehingga bersifat dinamis. Eskalasi konflik 7 Oktober 2023 menjadi titik balik yang memengaruhi cara IPSC mengidentifikasi dan membingkai konflik. Sebelum terjadinya eskalasi, agenda yang diselenggarakan bersifat edukatif dan komemoratif, seperti pada 13 September 2023, IPSC mengadakan agenda peringatan peristiwa pembantaian Sabra dan Shatila “*Remembering the Sabra and Shatila Massacre*” di Belfast. Kemudian pada 30 September 2023, dilaksanakan “*IPSC Annual Sponsored Walk: Wicklow Coastal Ramble*” sebagai perjalanan yang menutup beberapa agenda sebelumnya yang padat dan apresiasi atas terkumpulnya banyak dana serta lebih berorientasi pada penguatan solidaritas komunitas (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d).

Pasca peristiwa 7 Oktober 2023, agenda yang diselenggarakan IPSC bertransformasi menjadi “*Emergency Vigil*”, “*Emergency Rally*”, dan “*Emergency Protest*”. Hal ini terlihat jelas dalam penyelenggaraan “*Stand with Palestine - Emergency Vigil*” pada 11 Oktober 2023 yang dilaksanakan secara serentak di Dublin, Limerick, dan Waterford. IPSC menggunakan narasi “*indiscriminate bombing*”, “*collective punishment*”, dan “*ethnic cleansing*”, serta secara eksplisit mengatribusikan kesalahan tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada kekuatan Barat. Pergeseran *framing* pasca eskalasi konflik menjadi instrumen mobilisasi yang menekankan urgensi dan perluasan atribusi kesalahan secara struktural (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-b).

Atribusi kesalahan tidak hanya ditujukan kepada Israel sebagai aktor utama, tetapi juga kepada struktur yang lebih luas, termasuk dukungan internasional yang memungkinkan keberlanjutan konflik, negara-negara Barat, termasuk Irlandia, diposisikan sebagai bagian dari sistem yang turut berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Pada laman IPSC bagian *About Us — Aims, Objectives and Policy Positions* tertera bahwa, “IPSC menentang ideologi Zionisme yang ada saat ini sebagai bentuk kolonialisme pemukim yang rasis, yang dibangun di atas pelanggaran hak-hak rakyat Palestina secara terus menerus dan penuh kekerasan, serta penindasan rakyat Palestina di bawah rezim apartheid” (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a). Atribusi kesalahan didasarkan pada pandangan bahwa konflik di Palestina tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil dari relasi kekuasaan global yang melibatkan dukungan politik, ekonomi, dan militer dari berbagai aktor. Dalam konteks ini, pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina dipahami sebagai bagian

dari kejahatan perang dan praktik *de facto annexation* yang tidak lepas dari legitimasi dan pengabaian aktor-aktor internasional (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a).

Dalam berbagai agenda lainnya, narasi yang diangkat oleh IPSC berupa seruan agar pemerintah Irlandia menghentikan keterlibatannya, contohnya dalam kegiatan *Public Meeting: “Irish State Complicity in Israel’s Genocide”* yang secara tegas menyoroti keterlibatan Irlandia. Slogan yang digunakan adalah “*Stop Arming Israel*” dan “*No Weapons Through Ireland*” menunjukkan pola narasi yang menekankan upaya IPSC dalam mengarahkan perhatian publik pada peran domestik dalam konflik tersebut (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d).

Dengan demikian, melalui tahap *diagnostic framing*, IPSC berupaya menyatukan pemahaman dan persepsi publik dengan membangun narasi bahwa konflik di Palestina bukan sekadar konflik teritorial, melainkan konsekuensi dari sistem settler colonialism, apartheid, dan pendudukan yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina. Dalam framing yang dibangun IPSC, keberlangsungan sistem tersebut tidak terlepas dari dukungan politik, ekonomi dan diplomatik negara-negara Barat, termasuk Irlandia. Oleh karena itu, konflik Palestina dibingkai sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang memiliki kemiripan dengan pengalaman kolonial bangsa Irlandia. *Framing* ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan kesadaran kolektif masyarakat serta memperkuat resonansi solidaritas melalui keterhubungan antara perjuangan Palestina dan memori historis Irlandia terhadap kolonialisme.

3.2. Prognostic Framing

Pada tahap kedua, yaitu *prognostic framing*, agenda yang dilakukan adalah menyampaikan solusi dan rencana aksi atas masalah yang terjadi serta strategi untuk melaksanakan rencana tersebut. *Prognostic framing* cenderung memiliki kesesuaian dengan *diagnostic framing*, yang artinya terdapat batas rentang solusi dan strategi yang diusulkan agar tetap linear satu sama lain. Tahapan ini biasanya mencakup bantahan terhadap logika dan efektivitas solusi yang diusulkan oleh lawan (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 617).

IPSC menawarkan solusi berupa pemberian tekanan terhadap Israel melalui instrumen politik, ekonomi, dan sosial. Tekanan ini diwujudkan melalui desakan pemberlakuan sanksi, pemutusan hubungan diplomatik dan ekonomi, serta penghentian pengiriman senjata melalui wilayah Irlandia. IPSC memposisikan perubahan kebijakan dan tekanan struktural sebagai solusi dalam merespon konflik di Palestina dengan memperluas spektrum solusi dari yang awalnya aksi di jalanan menjadi lobi dan advokasi multilevel (IPSC 2024). Upaya yang dilakukan untuk mencapai ranah institusi adalah dengan mengadakan protes di depan Dáil dan dukungan terhadap pengajuan mosi sanksi di Senat Irlandia—*Seanad Éireann*, serta penyelenggaraan *hustings* (mimbar kampanye di mana kandidat partai politik berdiskusi langsung dengan masyarakat) menjelang pemilihan umum yang mengaitkan isu Palestina sebagai agenda politik nasional (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d).

Dalam agenda *General Election Hustings on Housing, the Climate Crisis and Palestine*, yang diselenggarakan oleh IPSC bersama *Friends of the Earth* dan CATU pada 26 November 2024, terdapat tiga isu yang dibahas yang mana salah

satunya adalah isu Palestina. Agenda *hustings* ini dihadiri oleh beberapa kandidat dari berbagai partai politik, di antaranya adalah, Janice Boylan dari Sinn Féin, Clare Daly dari *Independents 4 Change*, Eoghan Ó Ceannabháin dari *People Before Profit*, Michelle Hell dari Partai Buruh, dan Paddy Monahan dari Partai *Social Democrats*. Melalui forum ini, IPSC secara langsung meminta komitmen dari para kandidat yang hadir terkait pemberlakuan RUU embargo senjata, penghentian penggunaan Bandara Shannon untuk mengirimkan senjata ke Israel, dan untuk mengakhiri hubungan diplomatik Irlandia dengan Israel. Upaya ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara formal dapat menyalurkan tuntutan mereka, sehingga solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistematis dan menyasar pada perubahan kebijakan di tingkat institusional (IrelandPSC 2024).

Gambar 2. Penyelenggaraan Hustings oleh IPSC



Sumber: IPSC (November 2024)

Selain memberikan tekanan terhadap Israel dan pemerintah Irlandia, IPSC mendukung dan mempromosikan kampanye *Boycott, Divestment, and Sanction* yang dipimpin oleh masyarakat sipil Palestina sejak tahun 2005. Kampanye ini

terinspirasi oleh perjuangan masyarakat Afrika Selatan dalam melawan praktik apartheid melalui boikot, divestasi, dan sanksi internasional yang kemudian menekan rezim apartheid saat itu. Kampanye BDS merupakan strategi nirkekerasan yang menyerukan tekanan ekonomi, politik dan sosial terhadap Israel hingga memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk mengakhiri pendudukan dan kolonisasi wilayah Palestina, menjamin kesetaraan hak bagi warga Palestina, serta menghormati hak kembali bagi para pengungsi Palestina (Palstinian Civil Society Organisations 2005).

Dalam hal ini, IPSC menunjukkan kesesuaian antara identifikasi masalah dan solusi yang ditawarkan. Ketika pada tahap diagnostic IPSC membingkai situasi di Palestina sebagai bentuk praktik apartheid dan kolonialisme, maka kampanye BDS dipromosikan sebagai instrumen yang dianggap efektif menentang sistem tersebut, sebagaimana yang pernah diterapkan dalam perjuangan di Afrika Selatan. Aktivitas yang dilakukan IPSC mencakup dorongan untuk memboikot produk-produk yang secara resmi terafiliasi dan berasal dari Israel, mendukung inisiatif BDS di kampus dan lingkungan kerja, serta secara berkala turut mempromosikan BDS melalui sosial media. Lebih lanjut, upaya yang dilakukan adalah dengan melobi para aktor, grup band, dan orang-orang berpengaruh di masyarakat untuk mendukung seruan BDS. IPSC tidak berperan sebagai penggagas kampanye BDS, melainkan sebagai organisasi solidaritas yang turut memperluas jangkauan dan implementasi kampanye BDS di Irlandia (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-a).

Implementasi dari solusi-solusi yang disebutkan sebelumnya terlihat dari agenda-agenda yang diselenggarakan oleh IPSC, seperti kampanye *Workplace*

Day of Action pada 5 Juni 2024 yang bertepatan dengan peringatan *Naksa Day*. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya IPSC mengajak pekerja dan serikat buruh di berbagai sektor untuk menunjukkan solidaritas secara nyata terhadap Palestina serta menuntut segala bentuk dukungan terhadap Israel untuk dihentikan, mendukung kampanye BDS, serta mengupayakan lingkungan kerja dan serikat pekerja yang menjadi *Apartheid-Free Zones*. Dengan membawa isu Palestina ke ruang-ruang kerja, IPSC memperluas partisipasi publik dan gerakan solidaritas sekaligus mengintegrasikan dukungan terhadap Palestina dalam aktivitas sehari-hari masyarakat (Indy 2024).

Gambar 3. Poster Pelaksanaan Workplace Day of Action



Sumber: IPSC (Juni 2024)

Salah satu agenda yang dilaksanakan IPSC adalah “*How Irish Solidarity Can Help End Apartheid Israel Genocide*” pada 28 Maret 2024. Agenda ini menggandeng Saleh Hijazi sebagai narasumber, seorang koordinator dari *the Apartheid-Free Policy* di *the Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee* (BNC). Agenda ini diselenggarakan untuk membangun pemahaman kolektif mengenai akar konflik dan bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di awal, Saleh Hijazi menyampaikan tujuannya dalam

kesempatan tersebut “Yang saya ingin lakukan adalah mencoba memahami bersama-sama terkait genosida yang terjadi dan memahami apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan menghentikannya dengan sebaik-baiknya, serta memastikan hal tersebut tidak terulang kembali”. Ia mengajak audiens untuk memahami Palestina dari konteks sejarah awal, yang telah menjadi sasaran kolonialisme oleh pemukim Eropa selama lebih dari 100 tahun. Kampanye BDS dipromosikan sebagai strategi utama karena dinilai mampu menargetkan berbagai keterlibatan negara, institusi, perusahaan, dan organisasi yang memungkinkan keberlangsungan pendudukan Israel. Selain itu, Saleh Hijazi juga menekankan pentingnya mobilisasi akar rumput dan dorongan perubahan kebijakan agar solidaritas terhadap Palestina dapat menghasilkan dampak yang permanen (IrelandPSC 2024).

Selain menawarkan solusi dan strategi aksi, pada tahap ini IPSC juga melancarkan bantahan terhadap narasi *self-defense* Israel sebagai pembenaran aksi mereka. Kebanyakan media Barat yang seringkali bias dan sepihak dalam melakukan pemberitaan, bahkan sebagian besar lebih memprioritaskan narasi Israel daripada Palestina tanpa melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu (Sahar Khamis and Felicity Sena Dogbatse, n.d., 295). Melalui platform sosial media, IPSC menyajikan cerita dengan fokus perhatian pada penderitaan anak-anak dan perempuan Palestina untuk membantah narasi tersebut dan membuktikan bahwa korban dari Palestina adalah masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak bersalah. Strategi ini turut mengadopsi diskursus hak asasi manusia dan hukum internasional untuk mengubah stigma perlawanan menjadi perjuangan kemerdekaan yang sah (Shadi Abu-Ayyash 2015, 2).

Salah seorang aktivis IPSC, Raymond Deane, secara eksplisit mengekspos keterlibatan politisi lokal yang turut melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina, sehingga kampanye BDS diserukan sebagai solusi yang memungkinkan publik untuk bergerak secara mandiri tanpa perlu menunggu pemerintah. Menurut aktivis pro-Palestina lainnya, strategi BDS ini aplikatif bagi masyarakat untuk turut berkontribusi menekan Israel agar mengakhiri pendudukan atas Palestina dan mematuhi hukum internasional. Tahap ini menawarkan arah tindakan serta solusi yang diusulkan oleh IPSC. Strategi mobilisasi dengan mendesentralisasi titik titik aksi ke ruang kerja buruh, taman, dll menunjukkan perencanaan yang matang (Amanda Jingga Rambadani et al. 2025).

3.3. Motivational Framing

Pada tahap terakhir, *motivational framing*, agenda yang dilakukan adalah membentuk dorongan moral dan alasan agar orang atau khalayak ramai turut melakukan solusi yang ditawarkan pada tahap *prognostic framing*. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, dibentuk berbagai kosakata yang relevan dengan kondisi audiens sehingga ada dorongan untuk turut bergabung dalam gerakan (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 617).

IPSC membangun jembatan emosional antara pengalaman historis Irlandia dan perjuangan di Palestina dengan membingkai narasi-narasi seperti, narasi bersama terkait perlawanan, sentimen antikolonial serta perjuangan melawan penjajahan. IPSC pada tahapan ini memanfaatkan momentum konflik 7 Oktober 2023 sebagai transformasi dari aksi solidaritas rutin menjadi aksi mendesak ‘*emergency call*’ sehingga menciptakan perasaan urgensi di kalangan masyarakat

untuk turut terlibat. IPSC membingkai Israel sebagai penjajah sementara masyarakat Palestina sebagai penduduk asli yang tertindas. Narasi ini dicantumkan dalam pernyataan IPSC di laman '*Statement: For Freedom and Justice in Palestine — End Western Complicity with Israeli Apartheid!*' sebagai berikut, “Selama lebih dari tiga perempat abad, Israel telah menempatkan rakyat Palestina asli dalam keadaan kehilangan hak atas tanah dan penindasan, di bawah rezim apartheid kolonial pemukim yang kejam” (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-e).

Narasi ini mengingatkan masyarakat Irlandia bahwa praktik kolonial yang dialami masyarakat Palestina sekarang sangat familiar dengan praktik kolonial Inggris di Irlandia sebelumnya. Fakta bahwa berbagai macam praktik kolonial Inggris telah lebih dulu diuji coba di Irlandia sebelum kemudian diterapkan di wilayah imperium Inggris lainnya membentuk adanya '*shared experience*' setiap kali menyaksikan perjuangan Palestina (Browne 2024, 94). IPSC berupaya memperjuangkan hak asasi manusia Palestina yang sedang dilanggar dengan mengangkat diskursus hak asasi manusia yang memiliki daya tarik yang luas dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk bergabung dalam gerakan dan mendukung strategi serta solusi yang ditawarkan. Penggunaan narasi pelanggaran hak asasi manusia di Palestina akan memicu lebih banyak perhatian dari masyarakat (Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-e).

Pada tahap *motivational*, digunakan slogan-slogan yang merupakan strategi '*Call to arms*' yang tujuannya mengajak masyarakat untuk bertindak (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 617). Dalam berbagai aksi pasca eskalasi konflik 7 Oktober 2023, IPSC membentuk seruan seruan, seperti “*End*

Gaza Genocide”, “ *Stop Arming Israel*”, “*End the Siege of Gaza*”, dan “*Stop Gaza Genocide*”(Ireland Palestine Solidarity Campaign, n.d.-d). Slogan-slogan ini tercermin pada aksi protes 11 Oktober 2023, yang mengangkat narasi “*Freedom for Palestine*”, “*Boycott Israeli Goods*”, disertai unjuk rasa besar-besaran di The Spire, Dublin. Disusul dengan Demonstrasi Nasional dan pawai serentak di Dublin, Cork, Limerick, Galway, dan Ennis, di mana para demonstran bergerak menuju lokasi-lokasi tertentu seperti Kedutaan Besar Israel di Dublin pada 14 Oktober 2023 (Ronan McGreevy 2023). Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan penguatan identifikasi masalah yang sebelumnya dijelaskan pada tahap *diagnostic framing*, di mana situasi konflik sekarang dibingkai sebagai krisis kemanusiaan serius yang membutuhkan perhatian segera. Perubahan penggunaan diksi sebelum dan pasca eskalasi konflik menandakan bahwa *framing* yang dibangun oleh IPSC bersifat adaptif terhadap dinamika konflik, mengedepankan bagaimana pesan sederhana dapat digunakan untuk menggugah rasa empati publik sehingga membentuk mobilisasi solidaritas yang kuat (Robert D. Benford and David A. Snow 2000, 629).

Dorongan penghentian penggunaan Bandara Shannon sebagai titik transit pengiriman amunisi ke wilayah Israel menjadi prioritas isu yang ditekan IPSC terhadap pemerintah Irlandia merespon lonjakan penerbangan tanpa inspeksi hingga 5667% atau sebanyak 1354 penerbangan yang melewati Irlandia dengan mengangkut amunisi perang pada tahun 2024. Sebelumnya pada tahun 2023, tercatat 1185 penerbangan tanpa inspeksi. Hal ini secara sengaja terjadi atas izin menteri perhubungan, mengingat pengangkutan amunisi perang, senjata, dan barang-barang berbahaya dilarang melintas di semua pesawat sipil yang berada di

wilayah Irlandia maupun di wilayah udara. Pengecualian yang diberikan tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sejarah Irlandia sendiri. Pemerintah secara sadar menunda proses pembahasan RUU embargo senjata (*Arms Embargo Bill*) hingga enam bulan lamanya (alicemaryhiggins 2025).

IPSC menuntut dan mengawal agar RUU ini disahkan dengan melakukan aksi menggunakan slogan “*No Weapons Thru Ireland*” sepanjang tahun untuk mendesak pemerintah agar bertindak. pada Mei 2024, usulan undang-undang berhasil melewati tahap komite dan akan lanjut menuju tahap legislatif. Pemerintah merasa di bawah tekanan publik sehingga meloloskan agar tidak terlihat menghalangi RUU ini. Namun, sayangnya hingga 2 tahun kemudian RUU ini belum disahkan (IPSC 2024).

Gambar 4. Spanduk berisikan seruan penghentian mempersenjatai Israel melalui Irlandia



Sumber: Website IPSC 2024

Helen Ogbu anggota Dewan dari Partai Buruh menyatakan desakan terhadap pemerintah agar segera menjalankan inspeksi menyeluruh dan transparansi kepada masyarakat dengan melihat keputusan Prancis dan Italia yang telah menolak akses atas wilayah udara dan wilayah mereka bagi pesawat AS dan Israel yang mengangkut senjata. Di sisi lain, Spanyol juga telah mengambil

tindakan tegas dengan menolak penggunaan pangkalan militernya (Helen Ogbu 2026). Sikap acuh pemerintah dalam menyikapi persoalan ini secara tidak langsung memberikan dukungan logistik dan memfasilitasi pengangkutan amunisi beserta senjata untuk membunuh lebih banyak nyawa tidak bersalah di Palestina dan sangat bertentangan dengan nilai yang dianut oleh negara yang bangga akan perjuangan melawan kolonialisme nya (Mariamne Everett 2026).

Agenda aksi IPSC cenderung diwujudkan dalam bentuk aksi damai, seperti kampanye, demonstrasi, pidato publik. Bentuk mobilisasi massa yang seperti ini berhasil menarik partisipasi luas masyarakat, meski tidak menutupi kritik terkait efektivitasnya dalam mendorong kebijakan secara langsung. Conan Kavanagh, seorang aktivis solidaritas Irlandia menyampaikan kritiknya terkait aksi solidaritas di Irlandia yang berpusat pada aksi unjuk rasa, pidato oleh narasumber berpengaruh, dan demo yang walaupun bagus, namun harus diikuti dengan aksi yang lebih disruptif jika menginginkan tindakan yang berarti dari pemerintah (Mariamne Everett 2026). Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Aine Ní Threinin, yang terlibat dalam aksi protes di Bandara Shannon pada tahun 2024. Menurut Aine, penggunaan Bandara Shannon sebagai sarana mengangkut amunisi harus dilawan dengan cara yang lebih tegas, meski beresiko tinggi. Pengalaman kriminalisasi terhadap dirinya dan rekan-rekannya memberikan bukti bahwa pemerintah merespon aksi protes dengan represif (Mariamne Everett 2026).

Dari sini dapat dilihat bahwa pembingkai motivasi yang dibangun IPSC menunjukkan kecenderungan untuk mendorong partisipasi luas masyarakat melalui serangkaian aksi non disruptif agar tetap menjaga legitimasi gerakan di

mata publik. Pendekatan yang dipilih IPSC memang tidak selalu menciptakan perubahan instan, tetapi tekanan yang terbangun secara konsisten akan membuka ruang advokasi di tingkat institusional, seperti berhasil mengawal RUU Embargo Senjata menuju tahap legislatif (IPSC 2024).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini berfokus untuk mengkaji upaya *framing* *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) dengan mengangkat narasi *shared-grievances*, selama tahun 2023-2024 berdasarkan analisis tiga pilar dalam teori *framing* yang dikemukakan oleh Snow dan Benford, yaitu *diagnostic*, *prognostic*, dan *motivational framing* menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam membangun persepsi publik akan isu Palestina sebagai isu yang terkait dengan masa lalu sejarah Irlandia. Mobilisasi aksi yang secara konsisten dilakukan mengantarkan IPSC untuk dapat memengaruhi anggota Senat dan menuju pemerintahan meski belum mencapai perubahan kebijakan yang signifikan.

Pengalaman akan sejarah kolonialisme yang panjang ditambah dengan faktor kesamaan penderitaan membentuk paralel sejarah bagi Irlandia dan Palestina yang kemudian membentuk ikatan solidaritas erat. Penelitian ini mencoba menjelaskan secara komprehensif mulai dari apa saja kesamaan sejarah Irlandia dan Palestina, kemudian kemunculan gerakan solidaritas yang dipimpin oleh gerakan akar rumput hingga kemudian IPSC menjadi subjek penelitian dilihat dari signifikansinya dengan gerakan lain.

Dan pada tahap pemingkaihan, pada tahap *diagnostic framing*, IPSC membangun persepsi yang satu bahwa konflik yang terjadi di Palestina merupakan situasi yang lebih dari sekadar konflik teritorial, melainkan praktik

apartheid, genosida, kejahatan perang, dan *settler-colonialism* yang berakar dari ideologi Zionisme. Dan aktor yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Israel tidak lupa negara-negara yang turut mendukung Israel. Cara IPSC membingkai konflik melalui rangkaian agenda edukasi di samping aksi protes ke jalan membantu masyarakat luas untuk memahami konflik secara mendalam sekaligus memberi ruang untuk belajar dan diskusi kepada narasumber yang ahli. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham bahwa pemerintah Irlandia sendiri tidak terlepas dari relasi kuasa dengan Israel dan AS.

Kemudian, pada tahap *prognostic framing* yang dilakukan oleh IPSC cukup efektif karena menawarkan tindakan yang jelas dan aplikatif bagi masyarakat. Solusi yang diusulkan juga disusun dalam beberapa level, mulai dari tekanan politik dan institusional, seruan boikot produk melalui kampanye BDS, hingga mobilisasi aksi secara rutin. Masyarakat tidak hanya diposisikan untuk menonton tetapi turut menjadi aktor yang berpartisipasi langsung. Karena dirancang untuk ramah terhadap semua kalangan, strategi ini memungkinkan partisipasi kolektif luas dan memperbesar peluang resonansi gerakan di masyarakat.

Selain itu, upaya advokasi kebijakan di Dáil, dukungan terhadap RUU embargo senjata di Seanad, serta penyelenggaraan *hustings* menjelang pemilu membuktikan fokus IPSC tidak hanya pada mobilisasi massa, tetapi juga berupaya menghubungkan solidaritas publik dengan proses politik formal. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan begitu sistematis karena tujuannya menasar perubahan kebijakan jangka panjang, tidak hanya respon spontan terhadap eskalasi konflik.

Dan yang terakhir, tahap *motivational framing*, IPSC menggunakan narasi *shared-grievances*, antikolonialisme, dan apartheid untuk membangun keterkaitan dengan Palestina sehingga masyarakat yang terlibat merasa ada kedekatan emosional. Selain itu, penggunaan slogan-slogan seperti “*End Gaza Genocide*” dan “*Stop Arming Israel*” pasca eskalasi konflik 7 Oktober 2023 berhasil menciptakan perasaan urgensi dan dorongan moral bagi masyarakat untuk turut ikut dalam aksi solidaritas. *Framing* yang dibangun IPSC sangat adaptif terhadap dinamika konflik dan menggunakan bahasa yang sederhana tetapi tepat menyasar emosional masyarakat.

Efektivitas tahap motivasi juga dilihat dari kemampuan IPSC dalam menjaga partisipasi publik melalui aksi-aksi damai demi menghindari *backlash* dan untuk menjaga legitimasi gerakan. Meski bagi beberapa kalangan mobilisasi aksi oleh IPSC dikritik kurang memberi tekanan langsung terhadap pemerintah, strategi yang dilancarkan IPSC berhasil membuka ruang advokasi di tingkat institusional. Sehingga, efek yang dihasilkan pada tahap ini melahirkan solidaritas gerakan yang berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan yang bisa disempurnakan pada penelitian berikutnya, yaitu dengan menambah cakupan tahun mengingat banyak peristiwa penting yang memengaruhi dinamika gerakan solidaritas terhadap Palestina, khususnya IPSC, dan keputusan negara yang dipengaruhi peristiwa-peristiwa seperti ketika situasi Iran memanas, terbongkarnya kasus *Eipstein file* yang mendistraksi perhatian banyak kalangan sehingga pemberitaan tentang Palestina menjadi tenggelam. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis IPSC dari aspek lain yang memungkinkan untuk dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

AFP. 2025. *A Closer Look at the Successful BDS Campaign at TCD*. News. (Dublin, Ireland), June. <https://www.bricup.org.uk/news-2/another-look-at-the-successful-bds-campaign-at-tcd/>.

alicemaryhiggins. 2025. *Arms Embargo Bill Would Prohibit the Flow of Arms through Ireland to Israel*. News. April. <https://www.alicemaryhiggins.ie/news/post/arms-embargo-bill-seeks-to-curb-the-flow-of-arms-to-israel>.

Amanda Jingga Rambadani, Gladys Rotua Marito Manullang, Rinny Puspitasari, Aniqotul Ummah, and Fullah Jumaynah. 2025. *Framing Analysis of Kompas.Com's Coverage of Mobilization in the Social Movement Action of August 28029, 2025*. 5 (6).

Amandine Hess. 2025. "Why Is Palestine so Important in Ireland?" *Euro News* (Europe), September 30. <https://www.euronews.com/my-europe/2025/09/30/why-is-palestine-so-important-in-ireland>.

Amnesty International Ireland. n.d. "Anti-Apartheid Campaign For Palestine." Campaign. <https://www.amnesty.ie/anti-apartheid-campaign-for-palestine-2/>.

Anna Johnson. 2023. "Like Looking in a Mirror: Why Ireland Sees Itself in Palestine." *Utah State University*, December 12. https://artsci.usu.edu/social-sciences/political-science/international-studies/aggies-go/news/ireland_palestine_shared_history.

Aswar, Hasbi. 2024. "Agresi Militer Israel Di Gaza Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional." *Deepublish Publisher*, September.

Aysu Bicer. 2023. "History of Solidarity: Why Ireland Stands out in EU as Fierce Defender of Palestinian Rights." *AA.COM.TR*, October 18. <https://www.aa.com.tr/en/europe/history-of-solidarity-why-ireland-stands-out-in-eu-as-fierce-defender-of-palestinian-rights/3024978#>.

Bill Rolston. 2025. *Ireland and Palestine: The Roots of Resonance*. Race & Class Blog. October. <https://irr.org.uk/article/ireland-and-palestine-the-roots-of-resonance/>.

Browne, Bredan Ciaran. 2024. *Reading Irish Solidarity with Palestine through Ireland's "Unfinished Revolution"*. 53 (1): 92–103. <https://doi.org/10.1080/0377919X.2024.2314916>.

"Campaigns - Irish National Teachers Organization." 2023. Campaigns. <https://www.into.ie/about/our-structure/associated-groups/into-global/global-solidarity-network/other-campaigns/>.

David Twomey. 26 February. "Palestinian Support in Ireland: An Interview with the IPSC." *University Express*. <https://www.uccuniversityexpress.com/latestissue/palestinian-support-in-ireland-an-interview-with-the-ipsc>.

Dean M. Braa. 1997. "The Great Potato Famine and the Transformation of Irish Peasant Society." *Sage Publications, Ltd* 61 (2): 193–215.

Department of Foreign Affairs. n.d. *The Israeli-Palestinian Conflict*. Government of Ireland. <https://www.ireland.ie/en/dfa/role-policies/international-priorities/israeli-palestinian-conflict/>.

Freyer, Lauren, and Fatima Al-Kassab. 2024. "Ireland Becomes One of Europe's Most pro-Palestinian Countries." *NPR*, March 14. <https://www.npr.org/2024/03/14/1233395830/ireland-pro-palestinian>.

Fred Halliday. 1988. *Letter from Dublin*. October, 49–50.

Gerald M. Platt and Michael R. Fraser. 1998. *Race Gender Discourse Strategies: Creating Solidarity and Framing the Civil Rights Movement*. 45 (2): 160–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3097242>.

Giovanni Costigan. 1968. *The Anglo-Irish Conflict, 1919-1921: A War of Independence or Systematized Murder?* 5 (1): 64–86.

Helen Ogbu. 2026. *Government Must Guarantee No Weapons Transit Through Shannon - Councillor Ogbu*. (Dublin, Ireland), March. <https://labour.ie/news/2026/03/31/government-must-guarantee-no-weapons-transit-through-shannon-councillor-ogbu/>.

Indy. 2024. *Stand with Palestine: Workplace Day of Action on Naksa Day*. May 30.

IPSC. 2024. *UPDATE: Arms Embargo Bill Passes to Next Stage in Seanad*. Press Release. May. <https://www.ipsc.ie/action-item/armsemb>.

Ireland Palestine Solidarity Campaign. n.d.-a. *About Us – Aims, Objectives and Policy Positions IPSC*. About Us. (Dublin, Ireland). <https://www.ipsc.ie/>.

Ireland Palestine Solidarity Campaign. n.d.-b. "[Dublin] Stand with Palestine - Emergency Protest (Wed 11 Oct)." Event. <https://www.ipsc.ie/event/dublin-stand-with-palestine-protest-wed-11-oct>.

Ireland Palestine Solidarity Campaign. n.d.-c. "Ireland-Palestine Solidarity Campaign Branches." <https://www.ipsc.ie/branches>.

Ireland Palestine Solidarity Campaign. n.d.-d. *Past Events IPSC*. Dublin, Ireland. <https://www.ipsc.ie/past-events>.

Ireland Palestine Solidarity Campaign. n.d.-e. "Statement: For Freedom and Justice in Palestine - End Western Complicity with Israeli Apartheid." Statement.

<https://www.ipsc.ie/apartheid/statement-for-freedom-and-justice-in-palestine-end-western-complicity-with-israeli-apartheid>.

IrelandPSC. 2024a. *General Election Hustings on Palestine, Housing, and the Climate Crisis*. Video. <https://youtu.be/jlVXcWlfQaI?si=-u6jVCegwAHp4cco>.

IrelandPSC. 2024b. *Saleh Hijazi: "How Irish Solidarity Can Help End Apartheid Israel's Genocide."* https://youtu.be/cFKRksYCEVI?si=84Liy4u_eJDeq2ur.

Jane Ohlmeyer. 2020. *Ireland Has yet to Come to Terms with Its Imperial Past*. December 29. <https://www.irishtimes.com/opinion/ireland-has-yet-to-come-to-terms-with-its-imperial-past-1.4444146#:~:text=We%20lived%20as%20part%20of,the%20foundation%20of%20modern%20state>.

Kurniawan, Rostamaji. 2018. *Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies*. 1 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i1.4>.

Lex McMenamin. 2024. "Ireland Recognized Palestinian Statehood. Here's How Deep Their Solidarity Goes." *Teen Vogue*, May 29. <https://www.teenvogue.com/story/ireland-recognized-palestinian-statehood-solidarity>.

Mariamne Everett. 2026. *Palestine Ally Ireland Under Fire for Allowing Weapons Transfers to Israel*. Israel-Palestine Conflict Edition. March. Israel-Palestine Conflict Edition. <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/30/palestine-ally-ireland-under-fire-for-allowing-weapons-transfers-to-israel>.

Noel E. French. 2015. "Dublin 1160-1200 Part One: Political Change and Continuity." *Old Dublin Society* 68: 21–35.

Nurmalasari, Fiani, and Ida Susilowati. 2021. "Peran Ireland Palestine Solidarity Campaign terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018." *Universitas Darussalam Gontor* 3 (1): 111–28. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19996>.

Palestinian Civil Society Organisations. 2005. "Palestinian Civil Society Call for BDS." July 8. <https://www.bdsmovement.net/call>.

Ramona Wadi. 2021. *Reviews A Shared Struggle: Stories of Palestinian and Irish Hunger Strikers*. October. <https://www.middleeastmonitor.com/20211029-a-shared-struggle-stories-of-palestinian-and-irish-hunger-strikers/>.

Robert D. Benford and David A. Snow. 2000. *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. 26: 611–39.

Roland Martin. 2025. *Anglo-Irish Treaty*. Encyclopedia Britannica Edition. March 3. Encyclopedia Britannica Edition. <https://www.britannica.com/topic/Anglo-Irish-Treaty>.

Ronan McGreevy. 2019. "Marking the Norman Invasion of Ireland: 850 Years and Counting..." *The Irish Times* (Ireland), May 1. <https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/marking-the-norman-invasion-of-ireland-850-years-and-counting-1.3877350>.

Ronan McGreevy. 2023. *Supporters of Palestine March to Israeli Embassy in Dublin to Protest Against Bombing of Gaza*. (Ireland), October 14. <https://www.irishtimes.com/ireland/2023/10/14/supporters-of-palestine-march-to-israeli-embassy-in-dublin-to-protest-against-bombing-of-gaza/>.

Rory McVeigh, Daniel J. Myers, and David Sikkink. 2004. *Corn, Klansmen, Adn Coolidge: Structure and Framing in Social Movements*. 83 (2): 653–90.

Sahar Khamis and Felicity Sena Dogbatse. n.d. "The Gaza War Coverage: The Role of Social Media vs. Mainstream Media." *Culture and Society. University of Maryland, College Park*, 295–300.

Shadi Abu-Ayyash. 2015. "The Palestine Solidarity Movement, Human Rights and Twitter." Articles. *Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network* 8 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31165/nk.2015.82.370>.

Shamir Husan. 2014. "The Zionist Project and British Mandate in Palestine." *Indian History Congress* 75: 967–74.

Smith, Charles D., and Asha Vandanam. 2010. "The New Middle East: Palestine and the Arab-Israeli Conflict." May 18. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37049013/palestine_history-libre.pdf?1426870886=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_New_Middle_East.pdf&Expires=1743868796&Signature=PkH4mQ0qg9y14KAqpLeKdr9sec4AnhU03cz3Bmvv7bYTFXSHDNq2vX9AplCsa m3SeYiBj3VztmqdHAFTj4dBiSaKXH5APvP~tDyjAjnKAaQtDOckRpd7LGnQm614elwPKsqYJSSGxKdXJBgOmFKMVqkFT6bKpuFA1MeP22BYIwCGHUhiXEPC-QiEQJyoNEFCZOXq9qJfgt6nkBt6OvnjYPZCXmLuDAkcQtp5feDq-nJha5B0tnQOLHxnJa4eY3LsXPHPoclYdTmN7u~udPGW59ik1HsdKnNLj8gijpHaZz1rmcUyggI8xNsNC2CXm4pkYjJWnP4ywH1XwPUwPKOb1g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Syaifulloh, Muhammad. 2022. "Alasan Irlandia Terpecah: Dua Negara di Satu Wilayah." *Tempo*, September 12. <https://www.tempo.co/internasional/alasan-irlandia-terpecah-dua-negara-di-satu-wilayah-291777>.

Trocaire. n.d. "Campaigns - Trocaire." Campaigns. <https://www.trocaire.org/our-work/working-in-ireland/campaigns/>.

Uwe Flick. 2014. *An Introduction To Qualitative Research Uwe Flick Edition 5*. SAGE.

Yousef M. Al-Jamal. 2022. *A Shared Struggle: Stories of Palestinian and Irish Hunger Strikes*.

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Syifa Habibillah
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 13 Juli 2004
Alamat : Kost Elfara, Jl. Nglanjaran, Candirejo, Sardonoharjo, Sleman,
DI Yogyakarta
NIM : 22323168
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 Mei 2026

Najwa Syifa Habibillah